

SKRIPSI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM MENINGKATKAN
DISTRIBUSI PUPUK GUNA PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN
DI KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE**



Oleh:

NURUL AZIZAH

Nomor Stambuk Mahasiswa:105641108720

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM MENINGKATKAN
DISTRIBUSI PUPUK GUNA PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN
DI KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Politik (S.IP)

Disusun dan Diajukan Oleh

NURUL AZIZAH

Nomor Stambuk : 105641108720

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : *Collaborative Governance* Dalam
Meningkatkan Distribusi Pupuk Guna
Pengembangan Sektor Pertanian di Kecamatan
Kahu Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : Nurul Azizah

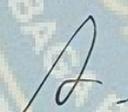
Nomor Stambuk : 105641108720

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

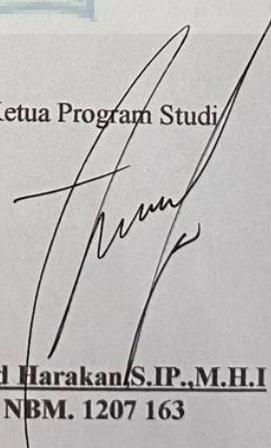

Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

Mengetahui

Dekan Fisip Unismuh Makassar

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 1207 163

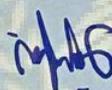
HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji Ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0257/FSP/A.4-II/V/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Makassar pada hari Rabu, 08 Mei 2024.

TIM PENILAI

KETUA

SEKERTARIS


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

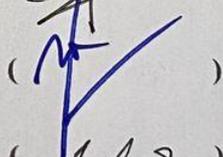
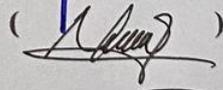
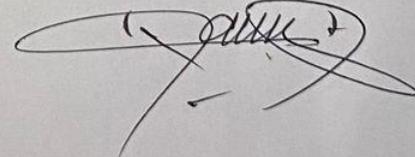
NBM. 730 727


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM. 992797

TIM PENGUJI

1. Dr. Nuryanti Mustari, S. IP.,M.Si
2. Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP.,M.Si
3. Nurbiah Tahir, S. Sos., M.AP
4. Hardianto Hawing, ST., MA


()

()

()

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurul Azizah

Nomor Stambuk : 105641108720

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 26 Maret 2024

Yang Menyatakan



Nurul Azizah

ABSTRAK

Nurul Azizah 2024. Collaborative Governance Dalam Meningkatkan Distribusi Pupuk Guna Pengembangan Sektor Pertanian Di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Dibimbing oleh Ansyari Mone dan Nurbiah Tahir)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Collaborative Governance* Dalam Meningkatkan Distribusi Pupuk Guna Pengembangan Sektor Pertanian Di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Tulisan ini akan mengkaji terkait *collaborative governance* yang mencakup identifikasi hambatan dan peluang, strategi debat untuk mempengaruhi dan merencanakan tindakan kolaborasi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penulisan kualitatif, sumber daya yang digunakan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Meningkatkan distribusi pupuk guna pengembangan sektor pertanian sudah terjadi proses kolaborasi antara pihak BPP Kahu, PT Suryani dan petani hal ini ditandai dengan adanya kerja sama antar *stakeholder* yang saling mendukung untuk mengatasi kelangkaan pupuk sehingga produksi bisa meningkat dan masyarakat petani puas. Namun masih terdapat hambatan-hambatan yang dirasakan dari aktor-aktor yang berkolaborasi dalam hal pengembangan sektor pertanian. Untuk mengoptimalkan proses kolaborasi dalam pengembangan sektor pertanian di Kecamatan Kahu peneliti merekomendasikan bahwa *stakeholder* harus meningkatkan komunikasi yang lebih intens agar dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak yang terlibat terutama petani, memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada petani tentang penggunaan pupuk secara efisien dan praktik pertanian yang berkelanjutan serta pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan pupuk subsidi untuk mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Sektor Pertanian, Pupuk Subsidi

KATA PENGANTAR

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Collaborative Governance Dalam Meningkatkan Distribusi Pupuk Guna Pengembangan Sektor Pertanian Di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Banyak rintangan dan tantangan yang penulis hadapi dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang selalu mengarahkan dan memotivasi penulis untuk mencapai dan memperoleh kebenaran dan menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua saya ayahanda Hasbi dan ibunda Nurjannah yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia,yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang,doa, dan semangat dengan penuh keikhlasan kepada penulis.Tolong hidup lebih lama di dunia ini dan izinkan saya

untuk mengabdikan dan membalas segala pengorbanan yang kalian lakukan selama ini. *Without prayers from parents the struggle will be in vain.*

2. Bapak Drs.H.Ansyari Mone,M.Pd selaku Pembimbing I saya dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku Pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan dan segala arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.H.I selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
5. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Keluarga besar saya yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, doa dan material yang tiada hentinya dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Segala perjuangan dan pengorbanan yang telah kalian lakukan untuk mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan pernah terlupakan. Setiap kata-kata semangat dan dorongan telah menjadi sumber inspirasi bagi penulis.
8. Teruntuk Inna, Fina, Ana, Restu, Hilma, Fatur, Iwan, Faiz, Syehyan, Ewin, Ian terima kasih tak terhingga atas dukungan dan kebersamaan kalian dalam setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih telah menjadi sahabat selama

ini dalam menghadapi dunia perantauan yang penuh dengan suka dan duka.Semoga kelak dikemudian hari kita akan tetap seperti ini.

9. Teruntuk Nur Mutma Inna terima kasih telah menjadi sahabat serta teman kamar kost penulis .Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik bagi penulis dikala suka maupun duka.Saudara tak sedarah yang menyaksikan segala yang terjadi pada penulis selama berada di dunia perantauan.Terima kasih atas segala kebaikanmu,ketulusanmu dan tingkah lakumu yang membuat penulis terkadang menjadi stress.Jika di ibaratkan dia seperti anak yang saya rawat dengan jiwa ibu-ibu yang setiap hari naik pitam karena kelakuannya yang kadang menjengkelkan.
10. Kepada teman-teman kelas IPC yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan panjang ini, terima kasih atas dukungan, kerjasama, dan kebersamaan yang luar biasa selama ini. Setiap tawa, setiap kesulitan yang kita lalui bersama telah menjadi bagian berharga dari perjalanan ini.
11. Kepada warga Pondok Aspuri Indah terima kasih untuk setiap senyuman, dalam setiap sapaan, terdapat kehangatan dan kebaikan yang tiada tara.Terima kasih sudah menjadi keluarga selama di dunia perantauan di Makassar.
12. Kepada keluarga sahabat saya Nur mutma inna terima kasih telah membeikan kebaikan dan ketulusan kepada penulis selama ini.Terima kasih telah menganggap penulis seperti anak sendiri.

13. Kantor BPP Kahu ,PT Suryani serta informan yang lain yang telah membantu dan memberikan arahan dan informasi kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.

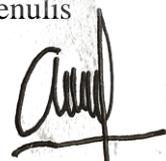
14. Terakhir terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dan bertahan dari banyaknya ketidakpercayaan, ketakutan, ketidakberanian hingga sampai dititik ini. Terima kasih melawan hiruk piruknya dunia perantauan yang diluar ekspektasi. *Happines is not a destination, it's a journey.*

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 26 Maret 2024

Penulis

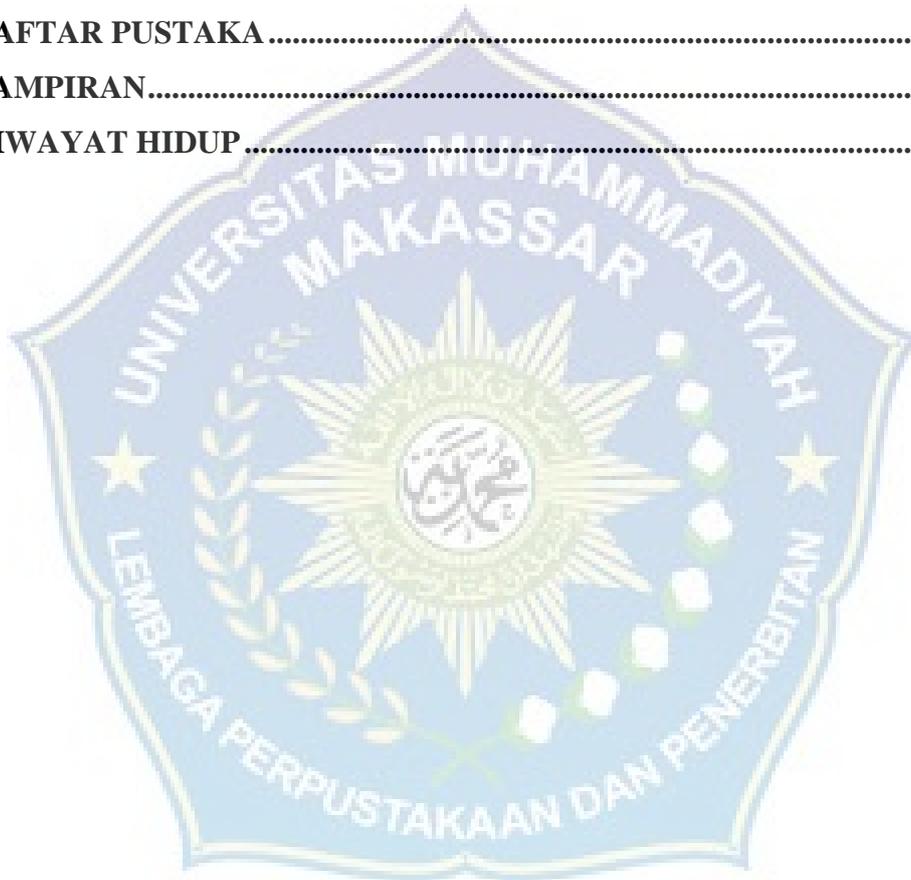


Nurul Azizah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teori.....	12
C. Kerangka Pikir	26
D. Fokus Penelitian	27
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian	29
C. Sumber Data.....	30
D. Informan.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32
G. Teknik Pengabsahan Data	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	35
B. Hasil Penelitian	51
C. Pembahasan Hasil Penelitian	73
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	84
RIWAYAT HIDUP	102



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Gambar 2.2 Overlay Visualization.....	9
Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pikir	27
Gambar 4.1 Peta Kecamatan Kahu	34
Gambar 4.2 Struktur organisasi BPP Kahu.....	37



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produksi Padi Kabupaten Bone 2020-2022	5
Tabel 2.1 Klaster	9
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	31
Tabel 4.1 Unsur Kolaborasi Pemerintah,Swasta dan Masyarakat	50
Tabel 4.2 RDKK Pupuk Subsidi Kecamatan Kahu	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dan perkembangan suatu negara tercermin dalam kemampuan pemerintahannya untuk beradaptasi dengan kebutuhan lingkungannya. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diperlukan perubahan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu strategi terbaru dalam pemerintahan saat ini yaitu *Collaborative Governance* yang menekankan pada kerja sama antara berbagai pihak untuk mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Irawan *collaborative governance* atau kolaboratif pemerintahan adalah upaya bersama yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam mengelola pemerintahan untuk mengatasi masalah-masalah publik. Kerja sama tersebut melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. (Iyoega et al., 2020)

Kolaborasi merupakan interaksi sosial di mana individu atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan memahami peran masing-masing. Namun, kesuksesan mencapai tujuan bersama memerlukan interaksi yang dilandasi oleh empati, saling menghormati, serta penerimaan terhadap kelebihan dan kekurangan tiap individu atau kelompok termasuk dalam konteks pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan untuk menerapkan *good governance*. (Toyib et al., 2022)

Collaborative governance atau kolaboratif pemerintahan sangat penting sebagai sebuah usaha kerja sama antara pemangku kepentingan dalam

mempertahankan pemerintahan dan mengelola urusan dalam penanganan masalah publik. Kerja sama ini mencakup pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Ansell dan Gashl juga menggambarkan *collaborative governance* sebagai pendekatan inovatif dalam pemerintahan yang melibatkan beragam pemangku kepentingan dan aparatur pemerintah untuk mencapai keputusan kolektif di sebuah forum. (Fatimah et al., 2021)

Thomson dan Perry mengemukakan *collaborative governance* sebagai salah satu cara membuat rencana pengembangan regional dengan *stakeholder* yang berorganisasi sendiri dan kreatif yang memiliki ide-ide brilian dan menguntungkan untuk perlindungan lingkungan. Pemerintahan kolaboratif adalah salah satu cara bagi *stakeholders* untuk mendiskusikan dan memberikan jawaban atas masalah dengan konflik sosial yang berkelanjutan terhadap upaya perlindungan lingkungan. Karena sektor pemerintah dan non-pemerintah sangat berkomitmen terhadap inisiatif perlindungan lingkungan sehingga keberadaan pemerintahan kolaboratif sangat penting. Namun, tanpa kerjasama semua *stakeholder* lainnya upaya ini tidak akan berhasil (Azis et al., 2022).

Konsep *collaborative governance* hadir dengan mengandalkan kerja sama di setiap sektor bukan hanya pemerintah saja namun juga membutuhkan partisipasi sektor swasta dan masyarakat sipil. Kolaborasi akan lebih sempurna jika beberapa prinsip dan faktor tertentu dapat diterapkan dan dipertimbangkan dengan baik. Kolaborasi inilah yang menjadi fokus dan keberhasilan dari konsep

collaborative governance termasuk dalam meningkatkan pengembangan di sektor pertanian.

Pertanian merupakan hal penting dalam penyedia kebutuhan pangan hingga penyedia lapangan pekerjaan. Pertanian juga merupakan suatu usaha yang sangat bergantung pada pengolahan tanah sehingga dapat menghasilkan tanaman yang memenuhi standar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari dan meningkatkan ekonomi di masa mendatang. Selain tanaman pangan, dapat pula tanaman perkebunan, tanaman hortikultura bahkan tanaman hias. Menurut Simatupang dan Dermoredjo pertanian adalah cara hidup bagi sebagian besar petani serta kegiatan ekonomi yang membantu mereka menghasilkan uang. Tindakan membuka lahan dan menanamnya dengan berbagai jenis tanaman - baik musim dan tahunan, makanan dan non-makanan adalah cara lain untuk mengkonseptualisasikan pertanian. Ikan dan hewan juga dihuni di sana. (Agus et al., 2022).

Dalam upaya meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani agar mencapai sasaran yang optimal, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mencakup perlindungan hak petani, pemberdayaan petani, peningkatan akses petani ke sumber daya, pengembangan infrastruktur, kesejahteraan petani, kemitraan dengan pihak swasta, penyediaan pangan, perlindungan terhadap iklim, keseimbangan ekosistem pertanian, pengaturan kemitraan petani dan penyediaan sanksi

Sektor pertanian tidak hanya menjadi penopang ekonomi lokal tetapi juga memiliki dampak signifikan pada kehidupan masyarakat setempat terlebih bagi

penduduk yang bermata pencarian sebagai petani. Meskipun memiliki potensi besar, tantangan seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi pertanian, masalah pupuk dan kendala akses pasar telah menjadi hambatan dalam mengoptimalkan sektor ini. Dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 106/Kpts/SR.130/2/2004 mengenai subsidi pupuk disebutkan bahwa alasan di balik pemberian subsidi yaitu untuk mendukung program ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian. Untuk itu, perlu didukung dengan penyediaan sarana produksi (pupuk) sampai di tingkat petani. Pemerintah menganggap peran pupuk sangat krusial dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian, sehingga kebijakan subsidi pupuk diterapkan (Kudrati & Kusmiati, 2010).

Pupuk memiliki peran penting dan strategis dalam meningkatkan produksi dan produktivitas petani. Oleh karena itu pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan yang mencakup aspek teknis penyediaan dan distribusi pupuk serta partisipasi aktif berbagai pihak dalam meningkatkan kesejahteraan dan kelancaran implementasi kebijakan serta distribusi pupuk kepada masyarakat dan petani. Tujuannya adalah agar pupuk mudah didapatkan dan ketersediaannya terjamin bagi petani. Namun permasalahan yang dihadapi oleh petani yaitu keterlambatan penyaluran dan kurangnya kuota pupuk subsidi sehingga dapat memengaruhi produktivitas dan produksi pertanian dalam upaya meningkatkan pengembangan sektor pertanian komoditas padi di Kecamatan Kahu.

Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Dengan kenyataan bahwa Indonesia termasuk negara agraris, maka negara ini menyimpan potensi besar pada sektor pertanian. (Badrudin et al., 2022). Salah satu Provinsi yang ada di Indonesia yang menyimpan potensi besar adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Indonesia bagian timur yang berada di urutan keempat sebagai penghasil pangan nasional setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Daerah Sulawesi Selatan dengan potensi sumber daya pendukung tertinggi termasuk daerah Bone, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Gowa, Takalar, dan Maros (Baja et al., 2017).

Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah yang memberikan kontribusi besar dibidang pertanian. Secara umum perekonomian Kabupaten Bone didominasi oleh sektor pertanian, khususnya sektor pertanian tanaman pangan. Penduduk Kabupaten Bone menjadikan sektor pertanian komoditas padi sebagai salah satu mata pencarian utama dalam perekonomian. Komoditas padi memainkan peran penting dalam menyediakan pangan bagi masyarakat setempat dan juga menjadi sumber pendapatan bagi petani di wilayah Kabupaten Bone.

Tabel 1.1 Luas Panen Padi Kabupaten Bone 2020-2022

2020	2021	2022
164.096 ha	165.259 ha	186.095 ha

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2020-2022

Data diatas menunjukkan bahwa produksi padi Kabupaten Bone dari tahun 2020 sampai 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 luas panen sebanyak 164.096 ha menjadi 165.259 ha di tahun 2021 kemudian mengalami peningkatan drastis di tahun 2022 sebanyak 186.095 ha. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian di Kabupaten Bone memberikan kontribusi yang besar bagi pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pembangunan sektor pertanian tidak dapat berjalan hanya dengan peran dari pemerintah, karena peran pemerintah bersifat terbatas sehingga dikhawatirkan pemerintah tidak dapat mengakomodir permintaan kebutuhan dari sektor pertanian. Pengembangan pertanian membutuhkan peran dari berbagai aktor yang kaitannya dalam hal ini konsep *Collaborative Governance* dapat menjadi alternatif dalam pengembangan sektor pertanian komoditas padi terkhususnya masalah pupuk di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

Dalam kolaborasi ini terlibat beberapa lembaga seperti Balai Penyuluhan Pertanian Kahu, Kepala Desa Biru, PT Suryani, serta kelompok tani Sipakainge dan petani. Melalui *collaborative governance*, pemerintah dapat melakukan kolaborasi untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan pengembangan sektor pertanian komoditas padi.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Governance Collaboration* dalam Meningkatkan Distribusi Pupuk Guna Pengembangan Sektor Pertanian di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana *collaborative governance* dalam Meningkatkan Distribusi Pupuk Guna Pengembangan Sektor Pertanian Kecamatan Kahu Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui *collaborative governance* dalam meningkatkan distribusi Pupuk Guna Pengembangan Sektor Pertanian Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini berpotensi untuk berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman, karena dapat memperluas wawasan yang ada. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat diterapkan secara efektif dalam meningkatkan distribusi pupuk guna pengembangan sektor pertanian di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

2. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai sumber masukan yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam meningkatkan distribusi pupuk guna pengembangan sektor pertanian di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

BAB II

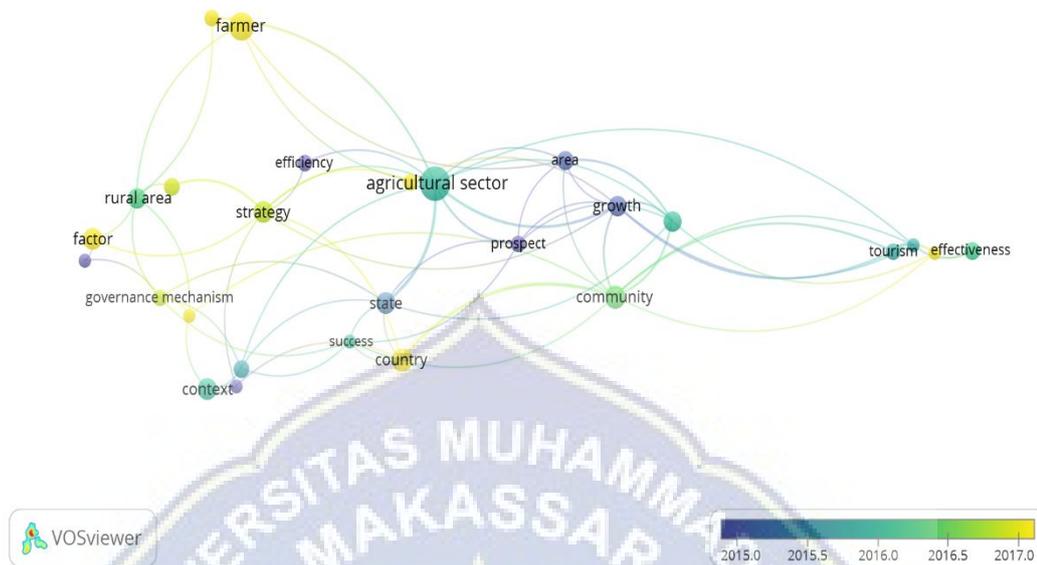
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan landasan yang dijadikan sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam membandingkan pengaruh suatu variabel bebas dan terikat. ujuan utama dari penelitian terdahulu adalah mengumpulkan dan mengevaluasi literatur, studi, dan penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya tentang topik yang sama atau serupa. Ini membantu peneliti mengetahui apa yang sudah diketahui dan dipahami tentang topik tersebut.(Wicaksana & Rachman, 2018).Penelitian terdahulu pada penelitian ini menggunakan bantuan software *VOSviewer*.



Gambar 2.1 Penelitian Terdahulu



Gambar 2.2 *Overlay Visualization*

Sumber: Diolah oleh VOSviewer,2023

Tabel 2.1 Klaster *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Distribusi Pupuk Guna Pengembangan Sektor Pertanian di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Klaster 1	Sektor agrikultur,daerah,pemerintah lokal,prospek,negara
Klaster 2	Kondisi,konteks,negara,ketahanan pangan,kesuksesan
Klaster 3	Tata kelola kolaboratif, masyarakat,kontribusi, efektivitas, Pariwisata
Klaster 4	Efisiensi,pertumbuhan,Indonesia,ketangguhan,strategi.
Klaster 5	Faktor,mekanisme pemerintahan,daerah pedesaan,pemangku kepentingan,pembangunan pedesaan yang berkelanjutan
Klaster 6	Produksi agrikultur,petani

Dari hasil penelusuran kepustakaan menggunakan *publish or perish* ditemukan 200 artikel jurnal yang diterbitkan dalam rentang waktu 2013-2023. Artikel-artikel ini berkaitan erat dengan *Collaborative Governance* dalam meningkatkan distribusi pupuk guna pengembangan sektor pertanian. Artikel-artikel tersebut kemudian dianalisis menggunakan *VOSviewer* untuk menentukan posisi proyek penelitian dalam ranah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dari hasil olah data *VOSviewer* terdapat 27 item yang mencakup beberapa penelitian yang menjadi objek dalam penelitian terdahulu, diantaranya.

1. Penelitian pertama dilakukan oleh (Kiswoyo et al., 2023) yang berjudul *Proses Collaborative Governance dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang* menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan jenis teori yang digunakan yaitu *face to face dialogue*, *trust buildings*, *commitment to process*, *shared*, dan *intermediate outcomes*. Adapun hasil penelitiannya yaitu menunjukkan proses *collaborative governance* dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang yang dianalisis dari aspek *face to face dialogue* (dialog tatap muka), *trust buildings* (membangun kepercayaan), dan *commitment to process* (komitmen untuk berproses) belum optimal, serta aspek *shared understanding* (berbagi pemahaman) dan *intermediate outcomes* (hasil sementara) sudah berjalan baik. Selain itu, juga ditemukan faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi yaitu faktor kepentingan pemerintah, struktur sosial, kultural/kebiasaan, dan bencana alam.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh (Chotimah et al., 2022) yang berjudul Model *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Lingkungan Maritim Di Kepulauan Seribu menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan konsep teori *collaborative governance* dengan memanfaatkan konsep maritime domain awareness dengan melibatkan multi layer governance dari aspek teknis, operasional maupun strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi terdiri dari adanya dialog, membangun kepercayaan antar aktor kolaborasi, adanya komitmen terhadap proses kolaborasi yang akan dijalin, adanya pemahaman yang sama terkait tujuan yang ingin dicapai dan hasil antara dari kolaborasi yang dilakukan antar aktor dalam pengelolaan sampah plastik laut
3. Penelitian ketiga dilakukan oleh (Iyoega et al., 2020) yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Pembangunan Sektor Pertanian di Kabupaten Bandung menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan konsep teori *collaborative governance*. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah daerah sangatlah dominan dan sebaliknya perguruan tinggi berkontribusi sangat minim. Daya jangkau petani terhadap pasar masih sangat rendah, hanya sebagian kecil petani yang telah memasarkan produknya ke luar daerah. Dalam memasarkan produk pertaniannya, petani sudah mulai memanfaatkan media *online*. Pemerintah diharapkan dapat membantu petani dalam membuka akses pasar melalui pemanfaatan teknologi pemasaran ataupun dengan mempertemukan petani dengan investor.

B. Kajian Teori

1. Konsep *Collaborative Governance*

Collaborative governance muncul di era paradigma pemerintahan, dimana pada saat itu masyarakat semakin berkembang sehingga pemerintah menghadapi masalah yang lebih kompleks. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki keterbatasan waktu untuk mengatasi masalah tersebut sehingga membutuhkan kolaborasi dengan aktor-aktor eksternal. *Collaborative Governance* sesungguhnya merupakan suatu konsep dalam tata kelola pemerintahan yang melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengembangan untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan. Keterlibatan semua kelompok pemangku kepentingan adalah untuk meningkatkan kualitas keputusan publik dan menghindari konflik pada proses pembangunan. (Iyoega et al., 2020).

Ansell dan Gash dalam jurnalnya *Collaborative Governance In Theory and Practice* merumuskan model *collaborative governance* berdasarkan kajian literatur. Hasil kesimpulan kajian tersebut digambarkan dalam 4 variabel utama yakni terdiri dari (1) kondisi awal (2) desain kelembagaan) (3) Kepemimpinan (4) proses kolaboratif (Ansell dan Gash, 2008).

1) Kondisi awal

Pada awalnya, kondisi lingkungan dapat mempengaruhi terbentuknya kolaborasi. Ada faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat kerja sama antara pihak-pihak terkait, termasuk ketidakseimbangan dalam pengaruh, sumber daya, dan pengetahuan di antara mereka; sejarah

interaksi sebelumnya yang mencakup kerjasama dan konflik; serta dorongan dan hambatan yang memengaruhi partisipasi dalam kolaborasi.

2) Desain kelembagaan

Desain kelembagaan mengacu pada aturan dasar yang mengatur kolaborasi. Ini penting sebagai legitimasi prosedural dalam kerja sama. Desain ini mencakup aturan partisipasi, pembentukan forum, aturan pelaksanaan yang jelas, dan transparansi dalam prosesnya.

3) Kepemimpinan

Dalam kolaborasi, konflik dan ketidakpercayaan sering muncul di antara pihak-pihak terlibat. Kepemimpinan yang dapat dipercaya dan diterima oleh semua pihak menjadi penting sebagai mediator. Kepemimpinan yang kuat, dihormati, dan dipercaya oleh semua pihak sangat dibutuhkan untuk kesuksesan kolaborasi, dan sering kali berasal dari komunitas pihak-pihak terlibat.

4) Proses Kolaboratif

Proses awal kolaborasi sering kali tidak jelas mulainya. Ada lima proses yang mungkin dimulai dari berbagai titik:

a. Dialog langsung. Kolaborasi didasarkan pada dialog antara pihak-pihak terlibat, dengan tujuan mencapai konsensus.

b. Membangun kepercayaan. Hal ini terkait erat dengan dialog, di mana pemimpin kolaborasi harus membangun kepercayaan di antara pihak-pihak terlibat.

- c. Komitmen terhadap proses. Ketergantungan antarpihak dapat meningkatkan komitmen terhadap kolaborasi sebagai proses yang berkelanjutan.
- d. Pemahaman bersama. Pihak-pihak terlibat perlu mengembangkan pemahaman bersama tentang tujuan, masalah, dan nilai kolaborasi.
- e. Hasil antara. Kolaborasi lebih mungkin berlanjut jika hasil yang diharapkan dapat dirasakan secara nyata, meskipun sebagai hasil antara dari proses kolaborasi (Astuti, 2020)

Collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007: 543) adalah pendekatan baru untuk pemerintahan yang menyatukan beberapa pembuat kebijakan di satu tempat untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, Ansell menggambarkan pemerintahan kolaboratif sebagai sistem pemerintahan pemerintah di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, konsensual, dan konsultatif dengan tujuan mengembangkan atau mengatur kebijakan publik, mengelola program, atau mengelola aset publik. Ansell dan Gash (2007:5) menekankan enam karakteristik. Pertama, sebuah lembaga publik memulai forum. Kedua, aktor non-pemerintah harus hadir di antara peserta forum. Ketiga, peserta harus secara aktif berkontribusi pada kebijakan dan bukan hanya “berkonsultasi” dengan pemerintah. Keempat forum harus disusun dengan benar, dan pertemuan harus memiliki nada yang konsisten. Kelima, konsensus harus mendukung keputusan yang dibuat. Keenam, kerjasama berpusat pada kebijakan publik atau kehormatan publik. Penggunaan pemerintahan kolaboratif

adalah metode untuk memecahkan masalah. Aktor yang berbeda melihat situasi dari sudut yang berbeda. Agar pihak-pihak memiliki pengetahuan bersama tentang masalah, pemerintahan kolaboratif bertindak sebagai perantara (Arrozaaq, 2016).

Pemahaman tentang *collaborative governance* dapat lebih terperinci melalui serangkaian fase yang membentuk proses dalam pemerintahan kolaboratif. Menurut Ratner(2012) terdapat tiga fokus fase atau tahapan yang merupakan bagian dari proses kolaborasi dalam mewujudkan konsep *collaborative governance*:

a. Identifikasi Hambatan dan Peluang

Tahap pertama ini merupakan tahap mendengarkan. Di sini, para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kerja sama mengidentifikasi berbagai tantangan yang mungkin timbul selama proses kolaborasi. Setiap pemangku kepentingan berbagi informasi tentang masalah yang mereka hadapi, dan pihak lain mendengarkan perspektif dari masing-masing pemangku kepentingan. Kemudian, mereka mempertimbangkan cara untuk mengatasi setiap masalah yang diidentifikasi, termasuk mencari solusi untuk masalah yang dapat muncul di masa depan. Setiap pemangku kepentingan memiliki kewenangan yang sama dalam menentukan kebijakan terkait setiap masalah yang diidentifikasi, serta mempertimbangkan peluang yang dapat diraih dari kolaborasi ini.

b. Strategi untuk Mempengaruhi

Tahap ini melibatkan dialog antara pemangku kepentingan. Salah satu fokus pembicaraan adalah mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah

yang dihadapi. Selanjutnya, mereka membahas pihak-pihak yang dapat mendukung penyelesaian masalah tersebut dalam konteks kolaborasi yang telah disepakati sebelumnya.

c. Merencanakan Tindakan Kolaborasi

Tahap ini melibatkan perencanaan implementasi dari strategi-strategi yang telah dibahas sebelumnya. Para pemangku kepentingan mulai merencanakan langkah-langkah awal dalam proses kolaborasi antar mereka (Ratner et al., 2012)

Gagasan *collaborative governance* menginstruksikan pemerintah untuk terlibat dan mendengarkan suara masyarakat dalam proses kolaborasi bersama untuk dapat memilih kebijakan dan tindakan yang perlu dirancang secara kolektif. Karena ide ini membutuhkan partisipasi publik, kerjasama pemerintah dalam pengembangan. Studi kolaborasi pemerintah dan pemangku kepentingan secara umum mengarah pada konsep kerjasama, yang menyarankan bahwa peran pemerintah sebagai eksekutif harus mencakup kehadiran publik dan *stakeholder* seperti investor atau lembaga dengan modal yang berfokus pada pengembangan tujuan pariwisata serta publik pada umumnya yang memainkan peran dalam tugas dan kemampuan masing-masing untuk tujuan kebijakan pengembangan dalam arah yang lebih baik. Dengan memasukkan komponen partisipasi publik hubungan kooperatif antara pemerintah dan para aktor lainnya dapat mengembangkan paradigma implementasi pemerintahan yang baik dan Kolaborasi dan partisipasi adalah komponen kunci dari *collaboration governance* yang merupakan metode yang digunakan untuk memutuskan tindakan atau

prosedur dengan tujuan memecahkan masalah masyarakat dan memajukan pembangunan yang dilakukan oleh sejumlah lembaga publik terkait lainnya yang secara langsung atau tidak langsung terlibat (Saputra et al., 2022)

Menurut Jung et al *collaborative governance* adalah tindakan menciptakan, mengarahkan, mendukung, mengoperasikan, dan mengawasi pembentukan organisasi lintas sektor untuk menangani masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh satu organisasi atau masyarakat umum. Dalam konteks ini *collaborative governance* mengacu pada konsep di mana sementara menciptakan wilayah pemerintah tidak dapat mengaturnya secara mandiri dan harus menggunakan bantuan *stakeholder* lain untuk memecahkan masalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Peran aktor yang terlibat, diantaranya terdiri dari peran pemerintah, swasta, masyarakat umum, akademisi dan juga media. Tugas pemerintah adalah untuk mengontrol, mengawasi, dan mengevaluasi pembangunan sambil menggabungkan program regional dan nasional. Sangat penting bahwa program lokal terintegrasi dengan yang di pusat karena tanpa koneksi ini, program yang diimplementasikan tidak memiliki dasar dan tidak ada dasar. Hal ini dapat membuatnya lebih sulit bagi pemerintah lokal untuk melaporkan kepada pemerintah pusat dan untuk proses pemantauan bergerak dari pusat ke daerah (Kirana & Artisa, 2020)

Daniel Seigler menjelaskan delapan prinsip utama dalam menerapkan *collaborative governance* yaitu: Melibatkan warga masyarakat dalam produksi barang publik, Mendorong masyarakat untuk memobilisasi sumber daya dan aset untuk mengatasi masalah publik, Mengikutsertakan tenaga profesional untuk

memberdayakan warga masyarakat, Melakukan pengambilan keputusan kebijakan melalui musyawarah, Menyertakan kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan dalam kebijakan, Mengarahkan kebijakan secara strategis, Mengubah kelembagaan untuk memberdayakan masyarakat dan menyelesaikan masalah publik, Membuat kebijakan yang mengandung unsur akuntabilitas (Astuti, 2020)

2. Konsep Pertanian

Pertanian menurut Van Aarsten (1953) adalah penggunaan tindakan manusia untuk menghasilkan tanaman dan/atau hewan yang pada awalnya diproduksi dengan sengaja menyempurnakan semua peluang reproduksi alami yang tersedia untuk tanaman atau hewan tersebut. Pertanian dapat didefinisikan secara luas sebagai kegiatan manusia yang melibatkan menanam tanaman yang cocok, pertanian, perikanan, dan hutan. Pertanian adalah kegiatan kultivasi yang menghasilkan tanaman makanan, dengan kata lain. Salah satu sektor ekonomi di dunia berkembang adalah pertanian. Untuk komunitas dengan warisan pertanian, sistem pertanian dianggap sebagai metode atau strategi untuk mengelola sumber daya alam untuk meningkatkan output pertanian. Meskipun masih ada perbedaan-perbedaan tertentu yang berbeda dari sistem pertanian lokal, sistem agraria yang digunakan untuk mengelola pertanian jenis rumput berbagi paralel dengan teknik yang digunakan di tempat lain. Setidaknya tiga aspek dari sistem pertanian Indonesia dapat dijelaskan:

(a) Sistem pertanian, yang mencakup hukum dan prosedur untuk pengolahan liar, prosedur penanaman biji-bijian, sistem irigasi liar; sistem panen, dan sistem pengukuran hasil.

(b) hak kepemilikan tanah.

(c) sistem kepercayaan dalam pertanian tradisional.

Salah satu pendorong utama perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan adalah sektor pertanian, yang berkontribusi pada pembentukan sekitar 20% dari total nilai tambah yang diciptakan. Sebagian besar petani Sulawesi Selatan terus menggunakan alat produksi tradisional, yang masih relatif dasar dalam bentuk dan bentuk. Alat-alat ini digunakan oleh budaya dengan cara yang konsisten dengan sistem teknologi produksi otonom mereka, yang didasarkan pada konsep budaya. (Amelia, 2023). Pentingnya pertanian Indonesia dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor:

- a) Memiliki potensi sumber daya yang besar dan beragam
- b) Berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan nasional dan
- c) Industri pertanian adalah fokus mayoritas populasi. (Paramithasari et al., 2021)

Sistem pertanian merujuk pada keseluruhan kerangka dan interaksi yang terjadi dalam praktik pertanian termasuk cara produksi, pengelolaan sumber daya dan elemen ekonomi, sosial dan lingkungan yang terlibat dalam aktivitas pertanian. Hal ini mencakup tanaman, hewan ternak, sumber daya alam, lingkungan, manusia, dan proses produksi yang saling terkait dan berinteraksi untuk membentuk sistem pertanian yang kompleks.

Berikut adalah unsur-unsur utama dari sistem pertanian:

- a) Tanaman: Kategori ini mencakup varietas tanaman, metode kultivasi, perlindungan tanaman, dan manajemen lahan.

- b) Hewan ternak: termasuk komponen pakan, kesehatan, pemeliharaan, dan pengelolaan limbah. Peternakan termasuk hewan seperti ternak, domba, kambing, ayam, atau babi.
- c) Sumber Daya Alam: Kategori ini mencakup konservasi keanekaragaman hayati, penggunaan pupuk, pencegahan erosi, dan manajemen air.
- d) Lingkungan: Melacak bagaimana operasi pertanian mempengaruhi lingkungan, termasuk bagaimana mengelola limbah pertanian dan melestarikan habitat alami dan emisi gas rumah kaca.
- e) Faktor manusia: dalam konteks pertanian mencakup interaksi antara petani, pekerja pertanian, kebijakan agraria, pasar dan perdagangan, pendidikan pertanian, serta dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi dalam lingkungan pertanian.

Perubahan dalam sistem pertanian dapat dipengaruhi oleh faktor geografis, iklim, permintaan regional, dan faktor budaya. Sistem pertanian mencakup berbagai model seperti agroforestri, pertanian terintegrasi, pertanian organik, pertumbuhan berkelanjutan, dan pertanian konvensional. Memiliki pemahaman menyeluruh tentang sistem pertanian menjadi krusial dalam merancang dan menjaga metode pertanian yang berkelanjutan, efektif, dan berkesinambungan, yang dapat mendorong keberlanjutan dalam aspek pangan, lingkungan, dan ekonomi (Siregar, 2023).

Sektor pertanian di Indonesia memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam menyediakan lapangan kerja, pasokan pangan dan kontribusi devisanya melalui ekspor, dan aspek lainnya. Di dalam sektor pertanian terdapat berbagai

komoditas dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Padi sebagai tanaman utama mendapat prioritas tinggi meskipun dari segi ekonomi bukan yang paling menguntungkan.

Pentingnya memposisikan sektor pertanian sebagai andalan ekonomi nasional sangat ditekankan. Dalam menghadapi kondisi saat ini strategi pembangunan harus fokus pada pengembangan sistem agribisnis dan agroindustri. Hal ini akan meningkatkan nilai tambah dari sektor pertanian. Prospek pengembangan agribisnis dan agroindustri ke depan dipandang sangat cerah, terutama mengingat posisi geografisnya yang strategis. Banyaknya tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian dan kontribusi produk pertanian terhadap perekonomian nasional menjadi indikator penting dalam menunjukkan potensi sektor pertanian untuk berkembang (Muhammad, 2015).

Pengembangan sektor pertanian merupakan salah satu strategi kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang. Konsep pengembangan wilayah pertanian dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antarwilayah dalam bidang pertanian. Untuk itu pengertian wilayah menjadi penting dalam pembahasan ini. Menurut PP Nomor 47 Tahun 1997 wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Jadi pengembangan wilayah merupakan upaya memberdayakan *stakeholders* di suatu wilayah dalam memanfaatkan sumberdaya alam dengan teknologi untuk

memberi nilai tambah atas apa yang dimiliki oleh wilayah administratif atau wilayah fungsional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup rakyat di wilayah tersebut. Dengan demikian dalam jangka panjang, pengembangan wilayah mempunyai target untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cara mencapainya bersandar pada kemampuan SDM dalam memanfaatkan lingkungan sekitar dan daya tampungnya serta kemampuan memanfaatkan instrumen yang ada. Dengan target tersebut dirancang skenario-skenario tertentu agar kekurangan-kekurangan yang dihadapi dapat diupayakan melalui pemanfaatan resources. Apabila konsep tersebut diterapkan di Indonesia, muncul persoalan berupa kekurangan teknologi untuk mengolah resources yang melimpah (Basuki, 2008)

3. Konsep Pupuk

Pupuk sangatlah penting bagi para petani untuk menunjang bercocok tanam. Namun, mereka masih khawatir dengan ketersediaan pupuk yang tidak stabil atau sulit didapatkan. Kelangkaan pupuk dapat menyebabkan kegagalan panen, yang berdampak buruk pada ekonomi masyarakat. Usaha petani dalam bercocok tanam bisa menjadi sia-sia jika pupuk tidak tersedia dalam waktu yang tepat, khususnya dalam rentang 3-4 bulan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pupuk agar para petani dapat terus melanjutkan kegiatan pertanian dengan hasil produksi yang maksimal. Secara umum, pengertian pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk memperbaiki kesuburan tanah dengan cara menambahkan bahan tersebut ke dalam tanah agar tanah menjadi

lebih subur. Oleh karena itu, pemupukan diartikan sebagai penambahan zat hara tanaman kedalam tanah untuk memperbaiki sifat-sifat kimia dan fisik tanah, seperti pengapuran, pemberian abu atau tanah mineral (lumpur, pasir dan liat) pada tanah organik dan sebaliknya bahan organik atau kompos pada tanah mineral (Sriwinarti, 2017).

Pupuk bersubsidi adalah salah satu program pemerintah untuk memenuhi sarana produksi petani khususnya petani padi. Tujuan dari program ini untuk membantu petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau dan meningkatkan produktivitas pertanian. Pemberian pupuk bersubsidi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Ketersediaan pupuk yang cukup sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas padi. Subsidi pupuk yang dilaksanakan dengan baik dan benar diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap produksi tanaman dan meningkatkan pendapatan petani (Krisna et al., 2022)

Salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi produktivitas pertanian adalah pupuk. Pupuk menjadi semakin langka di Indonesia ditengah meningkatnya kebutuhan petani. Karena kurangnya pasokan pupuk yang tersedia banyak petani di daerah mengalami kekurangan pupuk. Fakta tersebut menunjukkan bahwa masih ada banyak hambatan untuk keberhasilan pelaksanaan program pupuk subsidi untuk petani. Ini termasuk ekspor pupuk ilegal, kurangnya pengawasan atas pasar pupuk domestik, fakta bahwa sejumlah besar pupuk yang didanai adalah target

yang tidak pantas, dan keberadaan terus banyak subsidi yang tidak ditargetkan, tidak efisien dan produktif (Cahyono & Putra, 2022)

Dalam arti luas, pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia, atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. Pupuk dalam arti luas diklasifikasikan sebagai berikut: Secara umum, pupuk dikategorikan sebagai berikut: Pupuk yang alami, yaitu, berasal dari bahan alami atau ditemukan di alam, tidak mengalami pengolahan yang signifikan. Misalnya, guano, kompos, pupuk kandang, pupuk hijau, dan pupuk sintetis lainnya. Sedangkan pupuk buatan adalah pupuk yang dibuat di pabrik dengan mengubah sumber daya alam melalui proses fisika dan/atau kimia. contohnya Triphonska, urea, rustik, dan TPS. Pupuk dalam arti khusus yaitu zat yang mengandung satu atau lebih nutrisi bagi tanaman untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan (Rithania Michélie Tompunu, 2021).

Pupuk adalah kebutuhan pertanian yang penting dan strategis untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, daya saing, dan produktivitas pertanian yang digunakan dalam tanaman makanan, hortikultura, perkebunan orang, pertanian, dan perikanan,. Akibatnya, subsidi untuk pupuk dianggap diperlukan. Kebijakan untuk subsidi pupuk selalu berubah dari waktu ke waktu untuk mencerminkan perubahan kondisi lingkungan. Tetapi sejak 1969 tujuan dasar dari program subsidi pupuk tetap sama yaitu meningkatkan produksi pangan nasional dan produktivitas sambil

meningkatkan kesejahteraan petani. Subsidi untuk pupuk telah diberikan dalam bentuk harga ritel (HET) (Afandi & Arifin Fattah, 2022).

Pengertian pupuk bersubsidi dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013, yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa pupuk bersubsidi adalah jenis barang yang pengadaannya dan distribusinya mendapat subsidi dari Pemerintah, khususnya untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian. Jenis pupuk yang termasuk dalam kategori pupuk bersubsidi mencakup Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK, serta jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pertanian (Nurhikma, 2023)(No Title, 2023)

Adapun penerapan mekanisme dan tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi diatur secara berjenjang, sbb:

1. PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional, mengikuti prinsip 6 (enam) dari Lini I hingga Lini IV.
2. Produsen bertanggung jawab atas pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi sesuai prinsip 6 (enam) dari Lini I hingga Lini IV di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Distributor bertanggung jawab atas distribusi pupuk bersubsidi sesuai prinsip 6 (enam) dari Lini III hingga Lini IV di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

4. Pengecer bertanggung jawab atas distribusi pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani di lokasi kios pengecer.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah struktur konseptual atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengorganisasi dan memahami informasi, masalah, atau situasi tertentu. Kerangka pikir membantu individu atau profesional untuk merumuskan pemahaman, membuat keputusan, dan mengambil tindakan dengan lebih efektif.



Gambar 2.3 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir yang telah disusun oleh peneliti maka yang menjadi fokus penelitian yaitu: Identifikasi hambatan dan peluang, Strategi debat untuk mempengaruhi dan Merencanakan tindakan kolaborasi dalam *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Distribusi Pupuk Guna Pengembangan Sektor Pertanian di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Kolaborasi ini diharapkan dapat mencapai keberhasilan dalam meningkatkan distribusi pupuk guna pengembangan sektor pertanian.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian maka yang menjadi gambaran indikator yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Hambatan dan Peluang

Tahap pertama ini merupakan tahap mendengarkan. Di sini, para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kerja sama mengidentifikasi berbagai tantangan yang mungkin timbul selama proses kolaborasi. Setiap pemangku kepentingan berbagi informasi tentang masalah yang mereka hadapi, dan pihak lain mendengarkan perspektif dari masing-masing pemangku kepentingan. Kemudian, mereka mempertimbangkan cara untuk mengatasi setiap masalah yang diidentifikasi, termasuk mencari solusi untuk masalah yang dapat muncul di masa depan. Setiap pemangku kepentingan memiliki kewenangan yang sama dalam menentukan kebijakan terkait setiap masalah

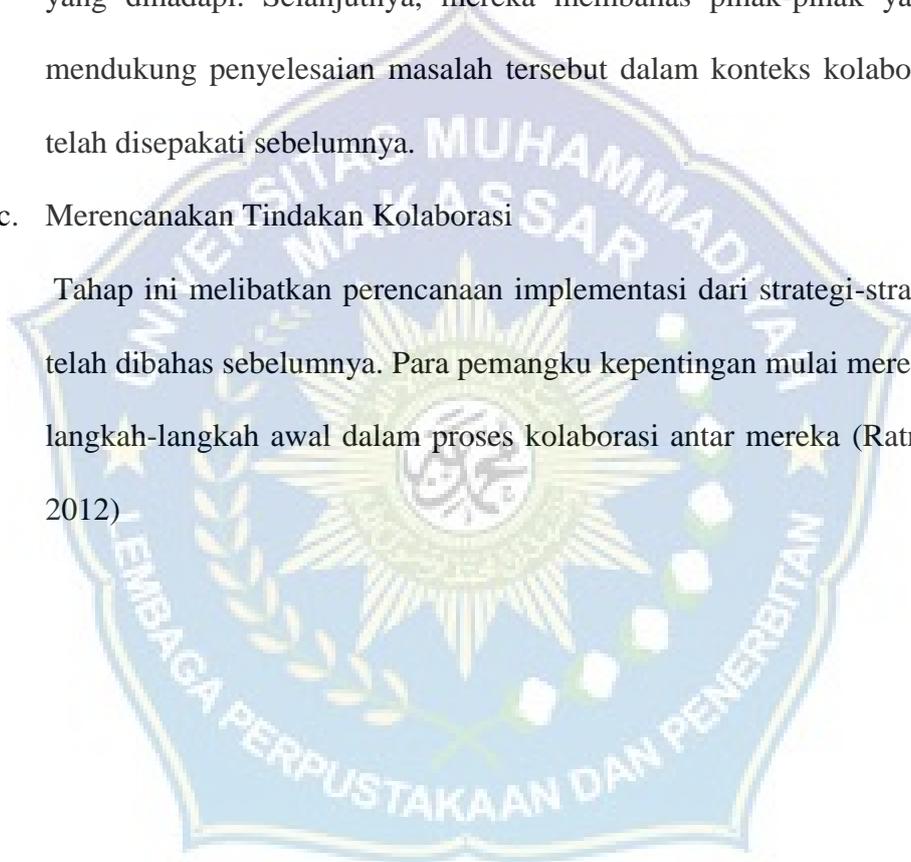
yang diidentifikasi, serta mempertimbangkan peluang yang dapat diraih dari kolaborasi ini.

b. Strategi untuk Mempengaruhi

Tahap ini melibatkan dialog antara pemangku kepentingan. Salah satu fokus pembicaraan adalah mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, mereka membahas pihak-pihak yang dapat mendukung penyelesaian masalah tersebut dalam konteks kolaborasi yang telah disepakati sebelumnya.

c. Merencanakan Tindakan Kolaborasi

Tahap ini melibatkan perencanaan implementasi dari strategi-strategi yang telah dibahas sebelumnya. Para pemangku kepentingan mulai merencanakan langkah-langkah awal dalam proses kolaborasi antar mereka (Ratner et al., 2012)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dari 1 februari 2024 sampai 6 Februari 2024. Adapun lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif. Dimana metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian terkait data dalam bentuk cerita berasal dari wawancara, observasi, kutipan dari dokumen.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena atau objek penelitian tanpa melakukan manipulasi atau pengaruh pada variabel-variabel yang diteliti. Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah mengumpulkan data yang akurat, menganalisisnya, dan kemudian menyajikannya dalam bentuk deskripsi atau gambaran yang sistematis, terstruktur, dan mudah dimengerti.

C. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian (responden) atau informasi dasar yang diperoleh di lapangan. Instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui membaca atau mempelajari perpustakaan, buku, atau literatur yang relevan dengan masalah penelitian. Sumber data sekunder meliputi internet, dokumen kelembagaan, dan laporan yang terkait dengan kebutuhan informasi penelitian.

D. Informan

Tabel 3.1 Tabel Informan

No	Informan	Jabatan	Inisial
1.	A.Murtiningsi,SP.,MP	Koordinator BPP Kahu	AM
2.	H.Sule	Pemilik PT Suryani	HS
3.	Rustam	Kepala Desa Biru	R
4	Abdul Haris	Ketua Kelompok Tani Sipakainge	AH

5.	Hasbi	Petani	H
----	-------	--------	---

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merujuk pada teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk menghimpun informasi, sementara instrumen pengumpulan data adalah alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti untuk menyusun proses pengumpulan data agar berjalan sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek atau fenomena penelitian tanpa intervensi atau pertanyaan langsung kepada subjek tersebut. Dalam observasi, peneliti mencatat dan memperhatikan perilaku, situasi, atau karakteristik yang relevan dengan penelitian. Observasi dapat dilakukan secara terstruktur, dengan pedoman dan checklist yang jelas, atau tidak terstruktur, yang memberikan fleksibilitas kepada peneliti dalam mengamati dan mencatat hal-hal yang terjadi.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi antara peneliti dan responden. Tujuannya adalah mendapatkan informasi mendalam dari responden tentang topik penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon. Wawancara dapat

terstruktur, dengan daftar pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, atau tidak terstruktur, yang lebih fleksibel dalam dialog dan aliran percakapan. Wawancara efektif untuk mendapatkan wawasan, pandangan, atau perspektif yang mendalam tentang subjek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen atau materi tertulis yang relevan dengan penelitian. Ini dapat mencakup laporan, publikasi, catatan resmi, dokumen kebijakan, data historis, atau materi lain yang terkait dengan topik penelitian. Dokumentasi membantu peneliti mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung temuan penelitian dan dapat digunakan untuk memperkuat argumen dalam penelitian. Selain itu, dokumentasi memungkinkan peneliti melacak perkembangan atau perubahan seiring waktu terkait dengan subjek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses di mana peneliti mengelola informasi yang dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan dalam penelitian, karena informasi yang diperoleh tidak selalu langsung menyediakan jawaban yang jelas. Tahapan dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi data (*data reduction*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi dan fokus terhadap data mentah yang telah dikumpulkan, dengan tujuan untuk menyederhanakan,

mengabstraksi, dan mentransformasikan data tersebut agar lebih dapat diolah dan dipahami.

2. Penyajian data (*data display*)

Peneliti mengembangkan deskripsi informasi yang terstruktur untuk menarik kesimpulan dan membuat keputusan. Penyajian data sering dilakukan dalam bentuk teks naratif untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

Peneliti berusaha untuk menarik kesimpulan dan memverifikasi hasil analisis dengan mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, dan kemudian mencatat kesimpulan tersebut.

G. Teknik Pengabsahan Data

Teknik keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki keabsahan ilmiah dalam menguji data yang diperoleh. Teknik keabsahan data terdiri dari tiga aspek, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Menguji kredibilitas data dengan memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Data ini kemudian dianalisis oleh peneliti untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat.

2. Triangulasi Teknik

Menguji kredibilitas data dengan memeriksa data yang diperoleh dari sumber yang sama namun dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara juga diverifikasi melalui observasi atau dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan validitasnya. Misalnya, data yang dikumpulkan melalui wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar dapat memberikan data yang lebih valid dan kredibel.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kecamatan Kahu



Gambar 4.1 Peta Kecamatan Kahu

Kecamatan Kahu adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bone yang berjarak 100 km dari Kota Watampone. Kecamatan Kahu terdiri dari 20 Desa/ Kelurahan. Luas wilayah Kecamatan Kahu adalah 189,50 km² dengan luas wilayah terluas berada di Desa Nussa dan luas wilayah terkecil berada di Kelurahan Palattae. Jumlah Penduduk Kecamatan Kahu pada tahun 2022 adalah sebanyak 41.413 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 20.092 jiwa dan perempuan sebanyak 21.321 jiwa. (BPS Kahu dalam Angka 2023). Dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Patimpeng.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Salomekko dan Kecamatan Kajuara
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontocani
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Libureng.

2. Profil BPP Kahu

Balai Penyuluhan Pertanian adalah sebuah lembaga atau unit organisasi yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penyuluhan di bidang pertanian. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kahu dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kahu terletak di jalan Andi Page no,59 Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.



Gambar 4.2 Halaman Depan Balai Penyuluhan Pertanian Kahu

Fungsi dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kahu adalah memberikan informasi, bimbingan, dan pelatihan kepada para petani atau pihak yang terlibat dalam sektor pertanian. Penyuluhan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi yang digunakan dalam kegiatan pertanian sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kahu memiliki visi dan misi dalam mengatasi permasalahan pertanian di Kecamatan Kahu. Adapun visinya yaitu “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Selain memiliki sebuah visi tentunya balai penyuluhan pertanian juga memiliki misi yang dijalankan untuk mencapai tingkat kesejahteraan bagi petani. Misi dari BPP Kahu yaitu:

- a. Menyelenggarakan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern.
- b. Menyelenggarakan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif.
- c. Pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing .
- d. Reformasi birokrasi

Berikut ini merupakan penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada BPP Kahu:

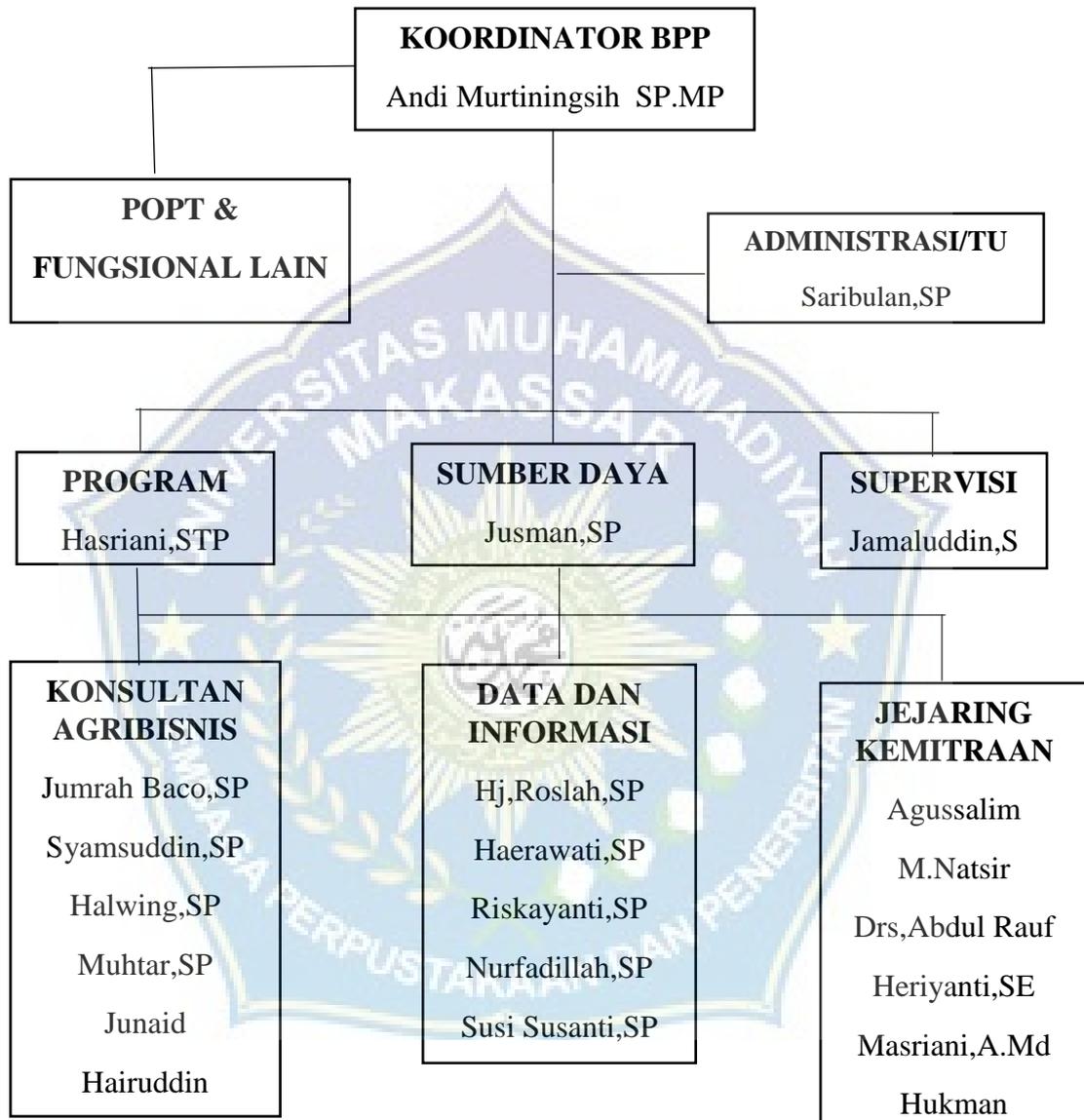


Gambar 4.3 Penghargaan BPP Kahu

Balai penyuluhan pertanian dalam menjalankan kinerja memiliki yang namanya struktur organisasi dengan tujuan agar segala yang akan dikerjakan dapat berjalan baik sesuai tugas dan fungsi masing-masing

STRUKTUR ORGANISASI

BPP KEC KAHU



Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPP Kahu

Berdasarkan struktur organisasi diatas,tupoksi yang ada di balai penyuluhan pertanian Kecamatan Kahu dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Koordinator BPP

Koordinator BPP memiliki tugas dalam perencanaan dan pengembangan program, koordinasi tim, pengembangan materi penyuluhan, pelatihan penyuluh, manajemen keuangan, koordinasi dengan pihak eksternal, monitoring dan evaluasi, advokasi dan representasi, pendataan dan informasi dan pemantauan kondisi pertanian lokal dan pelaporan. Koordinator BPP dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut.

- 1) Memberikan arahan dan inspirasi kepada anggota tim untuk mencapai tujuan bersama.
- 2) Mengembangkan strategi jangka panjang dan jangka pendek untuk mencapai visi dan misi Balai Penyuluhan.
- 3) Mengelola sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, pelatihan, dan penilaian kinerja.
- 4) Membina dan memberdayakan anggota tim untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas.
- 5) Mengambil keputusan strategis untuk mengatasi perubahan situasi atau tantangan yang muncul.
- 6) Membangun dan memelihara hubungan baik dengan pihak eksternal untuk mendukung keberhasilan program.
- 7) Melakukan evaluasi secara terus-menerus dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- 8) Berkomunikasi secara efektif dengan semua pihak terkait, termasuk petani, pemerintah, dan mitra lainnya.

- 9) Menangani masalah atau tantangan yang muncul dalam pelaksanaan program penyuluhan.
- 10) Mendorong inovasi dalam penyampaian penyuluhan dan mengikuti perkembangan terbaru di bidang pertanian.

b. POPT/Fungsional Lain

Petugas Pengendali Organisme Pengganggu tumbuhan memiliki tugas yaitu mengidentifikasi organisme pengganggu tumbuhan(OPT),pementauan dan pencatatan OPT,penyuluhan kepada petani,pemilihan metode pengendalian,pelaporan dan komunikasi,penelitian dan inovasi.POPT dalam menjalankan tugas memiliki fungsi sebagai berikut.

- 1) Membantu dalam mengelola risiko kerugian yang dapat diakibatkan oleh serangan OPT, dengan memberikan solusi dan strategi pengendalian yang efektif.
- 2) Dengan mengendalikan OPT, petugas membantu meningkatkan produktivitas pertanian dengan meminimalkan kerugian hasil panen yang dapat disebabkan oleh serangan organisme pengganggu.
- 3) Melalui penyuluhan dan bimbingan, petugas membantu petani agar dapat mandiri dalam mengelola OPT dan memahami pentingnya pengendalian yang tepat.
- 4) Menggunakan metode pengendalian yang ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

- 5) Berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan petani serta staf pertanian terkait dalam mengatasi masalah pengendalian OPT.
- 6) Memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pihak terkait, sehingga dapat dievaluasi efektivitas strategi pengendalian yang diterapkan.

c. Administrasi/TU

Administrasi pada balai penyuluhan pertanian memiliki tugas mengelola data terkait pertanian, pembukuan, pengelolaan surat menyurat, pengarsipan, perizinan dan registrasi, koordinasi acara dan pelatihan dan pemantauan program penyuluhan. Adapun fungsi dari administrasi bpp yaitu

- 1) Memastikan semua kegiatan penyuluhan berjalan dengan lancar.
- 2) Menangani berbagai aspek administratif untuk mendukung operasional harian.
- 3) Mengelola data dan informasi sebagai sumber daya utama serta menyusun laporan untuk mendukung pengambilan keputusan.
- 4) Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan terkait pertanian serta mengurus proses perizinan dan registrasi.
- 5) Menyediakan dukungan logistik untuk kegiatan penyuluhan dan pelatihan serta mengelola inventaris dan pemeliharaan peralatan.
- 6) Menangani surat-menyurat dan komunikasi internal dan eksternal.

- 7) Mengumpulkan data evaluasi untuk perbaikan program di masa mendatang.
- 8) Mengelola keuangan secara efisien dan transparan serta menyusun laporan keuangan untuk pertanggungjawaban dan evaluasi.

d. Programa

Programa bpp memiliki tugas yaitu merencanakan program penyuluhan pertanian, pengembangan materi penyuluhan, pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pengelolaan sumber daya program, evaluasi program, kolaborasi dengan pihak lain, pendampingan dan bimbingan. Programa bpp dalam menjalankan tugas memiliki fungsi yaitu

- 1) Memberikan informasi dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan petani serta mengembangkan keterampilan dalam berbagai aspek pertanian.
- 2) Mendorong partisipasi aktif petani dalam pengambilan keputusan serta memberdayakan petani untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
- 3) Mendukung adopsi teknologi dan inovasi pertanian terbaru serta mendorong praktik pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- 4) Memotivasi petani untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan serta menyediakan informasi tentang manfaat keberlanjutan bagi lingkungan dan ekonomi.

- 5) Mengorganisir seminar, lokakarya, dan pelatihan serta memfasilitasi pertemuan untuk pertukaran pengalaman dan informasi.
- 6) Melakukan pemantauan terhadap perubahan yang terjadi di tingkat pertanian serta mengidentifikasi perubahan positif dan dampak dari program penyuluhan.
- 7) Menyebarkan informasi terkini mengenai praktik pertanian dan kebijakan terkait serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu pertanian penting.

e. Sumber Daya

Bidang sumber daya pada BPP memiliki tugas yaitu pengelolaan SDM untuk kegiatan penyuluhan, pengelolaan keuangan, pengelolaan fasilitas dan peralatan, pengelolaan SDA, perencanaan kapasitas dan pengembangan asdm, manajemen teknologi informasi dan pengelolaan logistik. bidang sumber daya pada BPP dalam menjalankan tugas memiliki fungsi yaitu

- 1) Menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program serta memastikan ketersediaan personel, dana, dan fasilitas.
- 2) Mengawasi dan mengelola anggaran dengan cermat serta memastikan transparansi dalam penggunaan dana dan pertanggungjawaban keuangan.

- 3) Mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan untuk pelestarian sumber daya alam serta memberikan informasi tentang manfaat dan cara menjaga keseimbangan lingkungan.
- 4) Menyusun program pengembangan staf penyuluhan serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi.
- 5) Memastikan adopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi kerja serta menggunakan teknologi sebagai alat untuk pemantauan dan evaluasi program.
- 6) Menyusun perencanaan logistik yang efisien serta memastikan peralatan dan fasilitas yang diperlukan tersedia dan berfungsi dengan baik.
- 7) Berkoordinasi dengan pihak-pihak eksternal untuk mendukung sumber daya yang dibutuhkan serta membangun kerjasama dengan instansi terkait dan mitra lainnya.

f. Bidang Supervisi

Bidang supervisi pada BPP memiliki tugas yaitu evaluasi program penyuluhan pertanian, pemantauan kegiatan lapangan, pengembangan metode dan materi penyuluhan, pelatihan tenaga penyuluh, pelaporan dan dokumentasi. Adapun dalam menjalankan tugasnya bidang supervisi memiliki fungsi yaitu

- 1) Memastikan bahwa program penyuluhan pertanian dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

- 2) Memberikan masukan kepada tim penyuluhan berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
- 3) Menjamin kualitas penyuluhan dengan mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 4) Mendorong inovasi dalam metode penyuluhan dan memberikan dukungan untuk perbaikan terus-menerus dalam pelaksanaan kegiatan.
- 5) Berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, organisasi pertanian, dan pihak lain yang terlibat dalam pengembangan pertanian.
- 6) Memastikan bahwa tenaga penyuluh memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk memberikan penyuluhan yang efektif.
- 7) Melakukan evaluasi berkala terhadap kegiatan penyuluhan dan menyusun laporan untuk memberikan informasi kepada pimpinan dan pihak terkait.

g. Konsultan Agribisnis

Bidang konsultan agribisnis memiliki tugas menganalisis agribisnis, penyusunan rencana bisnis, pengembangan model bisnis, manajemen resiko, pelatihan dan bimbingan. Adapun fungsi bidang konsultan agribisnis dalam menjalankan tugas yaitu

- 1) Memberikan pendampingan dan konsultasi kepada petani atau kelompok pertanian untuk membantu mereka mengatasi permasalahan dan meningkatkan kinerja bisnis.
- 2) Melakukan analisis pasar untuk membantu petani memahami permintaan konsumen dan tren pasar yang dapat mempengaruhi penjualan produk pertanian.
- 3) Membantu dalam pengembangan kelembagaan atau asosiasi petani untuk meningkatkan daya tawar dan akses pasar.
- 4) Mengenalkan inovasi teknologi terbaru dalam pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
- 5) Memberikan saran terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam konteks keberlanjutan.
- 6) Membantu petani atau kelompok pertanian dalam membangun dan memperluas jaringan bisnis, termasuk kerjasama dengan pihak industri dan lembaga keuangan.
- 7) Melakukan evaluasi terhadap kinerja bisnis petani atau kelompok pertanian dan memberikan umpan balik untuk perbaikan.

h. Bidang Data dan Informasi

Bidang data dan informasi pada BPP memiliki tugas yaitu pengumpulan data pertanian, analisis data, manajemen database, pemetaan pertanian, pelaporan data, dan pengelolaan sistem informasi. Adapun fungsi bidang data dan informasi dalam menjalankan tugas yaitu

- 1) Menyediakan informasi yang diperlukan untuk membantu pimpinan dan tim penyuluhan dalam pengambilan keputusan terkait program dan strategi penyuluhan.
- 2) Menyediakan informasi terkait teknologi pertanian, pemilihan tanaman, dan praktik pertanian terbaik kepada petani untuk meningkatkan produktivitas.
- 3) Memfasilitasi kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk menilai dampak dan efektivitas program penyuluhan pertanian.
- 4) Mengamati dan melacak perkembangan sektor pertanian melalui analisis data untuk mengidentifikasi perubahan dan kebutuhan yang mungkin timbul.
- 5) Menyediakan informasi kepada pihak eksternal, seperti instansi pemerintah, lembaga riset, dan mitra lainnya, untuk mendukung koordinasi dan kolaborasi.
- 6) Menyampaikan informasi terbaru mengenai teknologi dan praktik pertanian yang dapat membantu petani meningkatkan hasil dan efisiensi usaha mereka.
- 7) Menjaga dan mengembangkan basis data yang berkelanjutan untuk mendukung keberlanjutan dan perbaikan terus-menerus dalam kegiatan penyuluhan pertanian.

i. Bidang Jejaring Kemitraan

Bidang jejaring kemitraan pada BPP memiliki tugas yaitu pengembangan kemitraan, koordinasi program kemitraan, pengelolaan

hubungan dengan pihak eksternal, penyusunan kerangka kemitraan, pelaksanaan program bersama, evaluasi kemitraan dan advokasi dan diplomasi. Adapun fungsi bidang jejaring kemitraan dalam menjalankan tugas yaitu

- 1) Membangun kemitraan untuk berbagi sumber daya, pengetahuan, dan teknologi antara balai penyuluhan dan mitra-mitra potensial.
- 2) Mencari sumber pendanaan tambahan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan, perusahaan swasta, atau organisasi donor untuk mendukung kegiatan penyuluhan.
- 3) Mendorong kolaborasi untuk penguatan kapasitas, seperti pertukaran pengetahuan, pelatihan, dan bimbingan teknis antara berbagai pihak.
- 4) Mengusahakan pendekatan holistik dalam penyuluhan pertanian dengan melibatkan berbagai stakeholder untuk menangani masalah-masalah kompleks.
- 5) Mengoptimalkan jejaring kemitraan untuk meningkatkan distribusi informasi dan penyebaran teknologi pertanian kepada petani.
- 6) Mendorong program penyuluhan pertanian yang terintegrasi melalui koordinasi yang baik antara berbagai mitra.
- 7) Membangun kemitraan dengan pihak swasta untuk membantu petani dalam meningkatkan akses mereka ke pasar, pembiayaan, dan teknologi pemasaran.

3. PT.SURYANI

Distributor pupuk adalah perusahaan yang ditunjuk oleh BUMN pupuk berdasarkan SPJB untuk melakukan penyaluran pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya. Distributor pupuk bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai jenis pupuk, termasuk pupuk organik dan anorganik, serta memastikan bahwa pupuk tersebut tersedia dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor pertanian.

PT Suryani merupakan salah satu distributor pupuk bersubsidi dibawah naungan PT.Pupuk Kalimantan Timur. PT Suryani terletak di jl.Ahmad Yani No.78 Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulsel. Jenis pupuk yang tersedia disini yaitu urea, NPK, dll. Nama pemilik dari PT Suryani yaitu H Sule.

a. Tugas Distributor Pupuk

- 1) Menegosiasikan pembelian pupuk dari produsen serta memastikan kualitas dan kuantitas pupuk yang diterima sesuai dengan pesanan.
- 2) Mengatur pengiriman pupuk ke toko pertanian, agen distribusi, atau langsung ke petani serta Memastikan pengiriman tepat waktu dan dengan kondisi yang baik.
- 3) Menerima pesanan dan memberikan informasi mengenai produk dan penggunaannya.

- 4) Melakukan kegiatan pemasaran untuk meningkatkan kesadaran produk pupuk.
- 5) Menyusun laporan yang dapat digunakan untuk analisis dan perencanaan.

b. Fungsi Distributor Pupuk

- 1) Memastikan kelancaran aliran pasok pupuk dari produsen hingga petani.
- 2) Menyediakan pupuk dengan mudah diakses oleh petani melalui toko pertanian atau agen distribusi.
- 3) Memberikan informasi kepada petani tentang jenis pupuk, dosis yang diperlukan, dan manfaatnya.
- 4) Memantau tren pasar dan permintaan untuk membantu dalam pengambilan keputusan strategis.

B. Hasil Penelitian

Collaborative governance dalam meningkatkan distribusi pupuk guna pengembangan sektor pertanian di Kecamatan Kahu merupakan serangkaian langkah yang terencana antara berbagai pihak yang terlibat. Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten penyumbang terbesar ekonomi Sulawesi Selatan di sektor pertanian. Setidaknya 20% hasil pertanian khususnya padi dihasilkan oleh Kabupaten Bone. Luasnya wilayah, topografi daerah yang cenderung rata, curah hujan dan irigasi air yang memadai merupakan salah satu keuntungan khusus pada Kabupaten Bone dalam mengelola sektor pertaniannya. Jenis pertanian di Kabupaten Bone terdiri dari padi, palawija dan hortikultura seperti

padi,jagung,kedelai,kacang tanah,ubi kayu,ubi jalar,timun,kacang panjang,bayam,bawang merah,bawang putih,tomat, cabai,cengkeh dll.

Pertanian pada komoditas padi merupakan salah satu sektor pertanian yang menonjol di Kecamatan Kahu.Pada tahun 2022 luas panen tanaman padi di Kecamatan Kahu mencapai 72.065 ha dengan volume produksi sebesar 10.881 ton.Namun, dalam upaya untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil panen padi, petani sering kali dihadapkan pada berbagai kendala termasuk permasalahan terkait pupuk.Pupuk memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan hasil pertanian, tetapi ketersediaan, aksesibilitas, dan keberlanjutan pupuk sering kali menjadi kendala dalam kegiatan pertanian komoditas padi.

Dalam konteks pengembangan sektor pertanian khususnya pada komoditas padi keberlanjutan dan efisiensi penggunaan pupuk menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Pupuk sebagai unsur esensial dalam pertanian tidak hanya memiliki dampak pada produktivitas tanaman, tetapi juga berkaitan erat dengan kesejahteraan petani.Dalam rangka meningkatkan pengembangan pertanian komoditas padi,pendekatan kolaboratif dalam mengakses pupuk di sektor pertanian telah menjadi fokus perhatian. Kolaborasi antara pemerintah daerah, petani, swasta dan pihak terkait lainnya melalui prinsip collaborative governance diharapkan dapat menciptakan sinergi dan solusi yang berkelanjutan.

Tabel 4.1

Unsur Kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat

Unsur-Unsur	Peran
Balai Penyuluh Pertanian Kahu (Pemerintah)	Membuat regulasi dan kebijakan terkait produksi, distribusi, dan penggunaan pupuk. Hal ini termasuk penetapan harga pupuk, pembatasan impor, dan subsidi untuk petani. Mengawasi dan mengendalikan produksi, kualitas, dan distribusi pupuk agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Kepala Desa Biru (Pemerintah)	Koordinator antara petani, pemerintah daerah, perusahaan pupuk untuk memastikan distribusi pupuk berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan petani. Melakukan pengawasan terhadap distribusi pupuk di tingkat desa dan memastikan pupuk didistribusikan secara adil dan efisien kepada petani.
PT Suryani (Swasta)	Memastikan ketersediaan stok pupuk yang memadai untuk memenuhi permintaan petani, mengatur distribusi pupuk dari produsen ke pengecer atau langsung ke

	petani.
Kelompok Tani Sipakainge (Masyarakat)	Mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pupuk di wilayah mereka, termasuk jenis pupuk yang paling dibutuhkan dan waktu yang tepat untuk penggunaannya.
Petani(masyarakat)	Menggunakan pupuk dengan bijak sesuai dengan anjuran teknis dan pedoman yang diberikan oleh pemerintah dan ahli pertanian.

Tabel 4.2 RDKK Pupuk Subsidi Kecamatan Kahu 2021-2022

Jenis pupuk	2021	2022
Urea	2.679.241 kg	4.576.711kg
NPK	4.794.964 kg	5.499.258 kg
Organik	7.834.874 kg	8.701.645 kg
Total	15.309.079 kg	18.777.614 kg

Sumber:Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kahu Tahun 2021-2022

Data diatas menunjukkan bahwa distribusi pupuk dari tahun 2021 ke tahun 2022 di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone mengalami peningkatan yang signifikan.Pada tahun 2021 jumlah pupuk sebanyak 15.309.079 kg kemudian terdapat penambahan sebanyak 3.468.535 kg hingga jumlah distribusi pupuk tahun 2022 sebanyak 18.777.614 kg .Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi

antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat tampaknya sedikit berhasil sehingga memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses petani terhadap pupuk subsidi di Kecamatan kahu Kabupaten Bone. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa hambatan yang muncul dalam kolaborasi ini.

1. Identifikasi hambatan dan Peluang (*Identifying Obstacles and Opportunities*)

Melakukan suatu kolaborasi dalam pengembangan sektor pertanian khusus pada komoditas padi bukan hanya menyatukan cara kerja dari setiap elemen namun dalam pelaksanaannya dibutuhkan identifikasi awal terkait hambatan yang terjadi sehingga terjadi masalah serta mengidentifikasi peluang yang tercipta dalam melakukan kolaborasi. Terkait hambatan yang tercipta dalam pengembangan pertanian komoditas padi yang dirasakan oleh BPP Kahu yang menyatakan:

“Ya hambatan yang dialami yaitu biasa terjadi keterlambatan penyaluran pupuk dari pihak distributor kemudian kuota yang terbatas dan anggaran terbatas sehingga petani mendapatkan pupuk sesuai dengan kuotanya bukan sesuai dengan keinginannya, sehingga inilah yang perlu diberikan pemahaman kepada petani bahwa menebus pupuk subsidi itu alur penebusannya melalui RDKK. Di RDKK inilah terdapat semua jenis kebutuhan pupuk subsidi yang dibutuhkan oleh petani (hasil wawancara dengan AM, tanggal 1 Februari 2024)

Adapun hambatan yang dinyatakan oleh Kepala Desa Biru terkait pupuk subsidi yaitu

“Salah satunya hambatan yang dirasakan petani disini itu kurangnya stok pupuk terutama saat musim tanam tiba. Sama kadang harga yang buat petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk dengan harga yang murah” (Hasil wawancara dengan R tanggal 6 Februari 2024)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis diketahui bahwa hambatan yang dialami dalam kolaborasi ini yaitu adanya keterlambatan penyaluran pupuk dan kuota pupuk yang terbatas dan biaya sehingga dapat memperlambat kegiatan pertanian dan mempengaruhi hasil pertanian komoditas padi. Penebusan pupuk subsidi berdasarkan RDKK yang diusulkan oleh kelompok tani dengan didampingi oleh penyuluh pertanian. RDKK berisi kebutuhan sarana produksi pertanian termasuk kebutuhan pupuk bersubsidi dimana memuat jumlah pupuk yang dibutuhkan berdasarkan lahan persawahan yang dimiliki petani. Sedangkan pernyataan dari pihak PT Suryani tentang hambatan terkait pupuk subsidi yaitu

“Hambatannya yaitu masalah teknis dalam penyaluran semuanya harus menggunakan sistem aplikasi sehingga ketika ingin menyalurkan pupuk terkendala jaringan yang kadang kurang baik serta sistem yang tidak bisa menerima karena banyak yang menggunakannya sehingga memperlambat penyaluran dan petani yang kadang ingin mengambil tetapi tidak terdaftar di RDKK” (Hasil wawancara dengan HS tanggal 2 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa hambatan dalam penyaluran pupuk subsidi yaitu terdapat masalah teknis seperti penggunaan sistem aplikasi yang terkendala jaringan. Dimana jaringan komunikasi dan teknologi informasi telah menjadi salah satu fondasi utama dalam berbagai sektor kehidupan termasuk dalam penyaluran pupuk pertanian. Penyaluran pupuk yang efisien dan tepat waktu dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan pangan. Memiliki akses yang baik terhadap aplikasi terkait penyaluran pupuk melalui jaringan yang handal memiliki sejumlah manfaat yang signifikan.

Adapun peluang kerja sama yang terjadi antara stakeholder dalam pengembangan pertanian komoditas padi dipaparkan oleh Koordinator BPP Kahu yang menyatakan

“Peluang kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam hal pupuk subsidi sangatlah besar. Salah satu peluang utamanya itu biaya penyalurannya. Swasta dapat memberikan modal dan infrastruktur yang dibutuhkan sementara pemerintah memberikan aturan. (hasil wawancara dengan AM,tanggal 1 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa peluang kolaborasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan yaitu dari segi anggaran dalam penyaluran pupuk subsidi. Sehingga tidak hanya pemerintah yang mengambil peran karena terkadang pemerintah kewalahan mengatasi penyaluran pupuk. Sedangkan hasil wawancara dari pihak PT Suryani menyatakan

“Kalo peluangnya kita sebagai swasta punya jaringan penyaluran yang luas dan dapat membantu memastikan pupuk subsidi tersedia dengan lebih baik walaupun kadang tidak cukup untuk petani (Hasil wawancara dengan HS tanggal 2 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa kerjasama dengan perusahaan swasta dapat meningkatkan efisiensi dalam distribusi pupuk subsidi. Swasta dapat membantu dalam manajemen rantai pasok, logistik, dan teknologi informasi untuk memastikan pupuk sampai ke tangan petani tepat waktu.

Selanjutnya ketika melakukan kolaborasi tentu membutuhkan pertemuan untuk membahas kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai pihak baik pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Hasil wawancara Koordinator BPP Kahu yaitu

“iya sering diadakan pertemuan rutin kepada petani untuk sosialisasi pupuk subsidi, sosialisasi sistem penyaluran dan penebusan pupuk subsidi dimana kita menjelaskan proses dan syarat bagaimana pupuk itu ditebus tentunya terdaftar di RDKK . Setiap pertemuan kita tetap mengawal dan mengawasi penyaluran dan penebusan pupuk subsidi sampe ke petani

agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita juga menjelaskan bagaimana cara menggunakan pupuk berimbang sehingga penggunaan pupuk sesuai dengan kebutuhan lahan karena kalau kelebihan pupuk juga tidak baik untuk tanah karena dapat merusak strukturnya” (hasil wawancara dengan AM, tanggal 1 Februari 2024)

Adapun wawancara yang dilakukan terkait pertemuan yang membahas pupuk pihak Kepala desa Biru menyatakan

“Ada pertemuan dengan para petani dan pihak terkait lainnya mengenai pupuk. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua petani mendapatkan pupuk yang mereka butuhkan tepat waktu dan dengan harga yang terjangkau tapi pihak BPP yang lebih tau mendalam masalah ini” (Hasil wawancara dengan R tanggal 6 Februari 2024)

Hasil wawancara diatas bahwa dalam kerja sama yang terjalin terdapat pertemuan rutin berupa sosialisasi terkait pupuk. Pihak BPP mengawal dan mengawasi segala kegiatan yang dilakukan terkait pupuk seperti memberi pemahaman kepada petani tentang pentingnya menggunakan metode pupuk berimbang pada komoditas padi agar tidak merusak lingkungan. Adapun hasil wawancara dari pihak PT Suryani yaitu

“Iya ada pertemuan tapi jarang, dipertemuan itu kita evaluasi apa-apa saja yang menjadi masalah selama ini baik itu kendala-kendalanya masalah pupuk, program-program pertaniannya. Intinya semua yang perlu untuk dibahas itu disampaikan di pertemuan itu yang dihadiri oleh berbagai pihak. (Hasil wawancara dengan HS tanggal 2 Februari 2024)

Hasil wawancara diatas bahwa terdapat pertemuan yang dilakukan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dimana dalam pertemuan tersebut mengevaluasi permasalahan yang terjadi selama terjadi kerja sama di bidang pertanian. Komunikasi yang terbuka dalam kolaborasi sangat mendukung kesuksesan kerja sama yang dilakukan oleh pihak-pihak terlibat.

Dalam melakukan kolaborasi tentunya terdapat permasalahan yang menjadi titik sulitnya melakukan kolaborasi dalam pengembangan pertanian komoditas padi terkait masalah pupuk. Hasil wawancara dengan Koordinator BPP mengatakan bahwa

“ Selain masalah lambat pupuk sama kurangnya kuota yang jadi permasalahan juga itu kurangnya minat petani menggunakan pupuk alternatif lain seperti pupuk organik padat maupun pupuk organik cair, Kurangnya pengetahuan petani dalam menggunakan pupuk alternatif jenis lain selain pupuk kimia sehingga mereka hanya terpaksa menggunakan pupuk kimia tersebut (hasil wawancara dengan AM, tanggal 1 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa permasalahan yang menjadi titik sulit pada pertanian padi terkait pupuk yaitu selain keterlambatan penyaluran dan kurangnya kuota pupuk juga masih kurangnya pemahaman petani tentang manfaat dari pupuk organik untuk pertanian. Dimana para petani hanya berpatokan untuk menggunakan pupuk kimia tanpa melihat efek samping jika digunakan terlalu berlebihan untuk lahan pertanian serta turunnya kualitas padi.

Sedangkan pernyataan pihak PT Suryani tentang permasalahan yang menjadi titik sulitnya dalam pertanian komoditas padi terkait pupuk yaitu

“yah itumi karna sekarang penyaluran menggunakan sistem aplikasi serba digitalisasi namun banyak petani yang ingin menggunakan jalan simpel untuk menebus pupuk sehingga hal tersebut yang menjadi hambatan dalam penyaluran pupuk” (Hasil wawancara dengan HS tanggal 2 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa permasalahan yang menjadi titik sulitnya yaitu masih kurangnya pemahaman petani tentang cara menebus pupuk subsidi dimana sekarang segala bentuk penyaluran menggunakan sistem aplikasi guna memperketat penyaluran pupuk subsidi sehingga tidak diselewengkan dan

mencegah duplikasi penerima pupuk. Sistem ini dilakukan agar pupuk subsidi dapat digunakan oleh seluruh petani secara petani sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan pada RDKK.

Adapun hasil wawancara dari indikator ini dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak memiliki hambatan tersendiri pada pertanian komoditas padi terkait masalah pupuk subsidi. Dari pihak BPP yaitu keterlambatan penyaluran pupuk dan kuota pupuk subsidi yang terbatas sedangkan hambatan dari pihak swasta yaitu masalah teknis dalam penyaluran pupuk subsidi. Dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada pertanian komoditas padi baik BPP Kahu dan PT Suryani memiliki cara yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan pupuk walaupun belum maksimal seperti adanya penambahan kuota serta mengevaluasi lebih mendalam terkait kebutuhan petani.

2. Strategi Debat untuk Mempengaruhi (Debating Strategies for Influence)

Strategi debat untuk mempengaruhi dalam konteks kolaborasi mencakup pendekatan yang membangun, membuka dialog dan mencari solusi bersama. Pelaksanaan hal ini harus ditekankan pentingnya membangun pemahaman bersama dan cari solusi yang menguntungkan semua pihak, bukan hanya satu kelompok. Selain itu perlu juga mendengar pandangan dan argumen dari pihak seksama. Penyelesaian pertanian komoditas padi terkait pupuk dengan indikator ini mengharuskan setiap pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang bekerja sama untuk fokus pada masalah yang sama-sama dihadapi dan berusaha mencapai solusi yang saling menguntungkan. Hasil wawancara dengan Koordinator BPP Kahu yaitu:

”iya pastinya ada kerjasama dengan pihak lain disektor pertanian seperti pihak swasta tergantung dibidang apa kalau terkait masalah pupuk juga ada seperti distributor dan pengecer pupuk subsidi.Dari kita mereka melihat data mengenai berapa saja pupuk yang dibutuhkan petani..Kalau pupuk yang tersedia memadai pasti mendukung produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.karena kita semua memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak (Hasil wawancara dengan AM,tanggal 1 Februari 2024)

Adapun wawancara yang dilakukan terkait kerja sama yang terjalin terkait pupuk pihak Kepala desa Biru menyatakan

“Kerjasamanya itu sama pemerintah sama perusahaan pupuk.Kerjasama ini meliputi penyediaan pupuk subsidi untuk petani di desa kami”(Hasil wawancara dengan R tanggal 6 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa terdapat kerja sama antara pihak lain termasuk dengan pihak yang berkaitan dengan pupuk.Masing-masing pihak telah mendapatkan tugas sesuai dengan kewenagannya.Hal ini ditunjukkan melalui data base yang digunakan oleh pihak swasta dari BPP terkait dengan alokasi pupuk yang dibutuhkan petani sesuai dengan RDKK yang telah dibuat.Adapun hasil wawancara dengan PT Suryani menyatakan:

“Bicara tentang kerja sama dengan pihak lain pasti ada apalagi masalah pupuk.Kita bekerja sama dengan pihak pemerintah seperti .Dari mereka kita melihat data-data petani dalam penyaluran pupuk untuk pertanian padi.Berapa kuota pupuk yang dibutuhkan walaupun pupuk kadang kurang memenuhi” (Hasil wawancara dengan HS tanggal 2 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pihak swasta bekerja sama dengan pemerintah terkait dengan penyaluran pupuk untuk petani.Pihak swasta menggunakan data sesuai dengan RDKK yang telah diberikan oleh pihak BPP yang dibantu oleh kelompok tani.Kerja sama ini dilakukan untuk meningkatkan komoditas pertanian khususnya padi untuk keberlanjutan ketahanan pangan.

Mengatasi hambatan yang dirasakan dalam pengembangan pertanian komoditas padi, tentu harus ada strategi atau solusi yang dijalankan oleh setiap pihak yang bekerja sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator BPP Kahu yaitu:

”Strategi atau cara yang dilakukan dalam mengatasinya yaitu penambahan kuota pupuk bersubsidi, kita lakukan juga evaluasi mendalam terhadap kebutuhan pupuk subsidi agar lebih merata kepada petani sesuai dengan kebutuhannya bukan keinginannya serta meningkatkan pengetahuan kepada petani tentang cara penggunaan pupuk yang bukan hanya pupuk kimia tapi juga pake pupuk dari kotoran hewan (hasil wawancara dengan AM, tanggal 1 Februari 2024)

Adapun wawancara yang dilakukan terkait strategi yang dilakukan terkait pupuk pihak Kepala desa Biru menyatakan

“ Berkoordinasi sama pihak terkait baik dari pemerintah maupun pihak swasta untuk memastikan pasokan pupuk subsidi tetap lancar. Sama mendorong penggunaan pupuk organik dan teknik pertanian ramah lingkungan lainnya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia” (Hasil wawancara dengan R tanggal 6 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa cara yang digunakan dalam pengembangan pertanian komoditas padi terkait masalah pupuk yang terjadi di Kecamatan Kahu yaitu perlu adanya penambahan kuota pupuk bersubsidi bagi petani, melakukan evaluasi terkait kebutuhan teknis petani agar pupuk subsidi terbagi sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan serta memberi pemahaman kepada petani untuk menggunakan pupuk organik dan tidak bergantung pada pupuk kimia. Sedangkan hasil wawancara dari pihak PT Suryani yaitu:

“Dengan cara penambahan alokasi subsidi supaya petani puas menggunakan pupuk. Dengan subsidi yang lebih besar, petani dapat memperoleh pupuk dengan harga lebih murah, mengurangi beban biaya produksi. Hal ini tidak hanya mendukung produktivitas dan hasil panen yang lebih baik, tetapi juga memberdayakan petani kecil. Dan memberi

pengajaran kepada petani cara menggunakan pupuk sesuai prosedurnya”
(Hasil wawancara dengan HS tanggal 2 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa penambahan alokasi pupuk subsidi dapat menjadi solusi dari permasalahan pupuk untuk pertanian komoditas padi agar para petani dapat menggunakan pupuk secara maksimal sehingga hasil produksi pertanian dapat meningkat. Serta memberi pemahaman kepada petani cara menggunakan pupuk secara efektif dan efisien.

Kolaborasi yang terjalin ini harusnya memiliki sebuah cara efektif yang bisa mengatasi masalah pengembangan pertanian komoditas padi terkait pupuk di Kecamatan Kahu. Pembahasan tentang cara yang sejauh ini dilakukan oleh BPP Kahu yaitu

“Kalau bicara tentang keefektifannya belum bisa dijamin tapi sudah baik namun belum maksimal dan sedang kita usahakan asal semua stakeholder terlibat seperti bpp, swasta serta petani itu sendiri dalam upaya menangani permasalahan pupuk sehingga meningkatkan hasil pertanian serta harus ada kesadaran dari masing-masing pihak. Memberi tahu petani tentang penggunaan pupuk secara efisien dan efektif. Hal ini dapat mencakup teknik aplikasi yang tepat, dosis yang disarankan, dan manfaat penggunaan pupuk yang benar. (hasil wawancara dengan AM, tanggal 1 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Kerja sama antara pihak yang terkait sudah baik tetapi belum maksimal. Karena kerja sama akan berjalan dengan baik jika semua *stakeholder* yang terlibat memainkan perannya masing-masing sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan. Apalagi konsep *collaborative governance* tidak hanya mengandalkan pemerintah saja namun membutuhkan partisipasi pihak swasta dan masyarakat. Sedangkan hasil wawancara dengan pihak PT Suryani mengatakan bahwa

"kalau saya rasa sudah baik tapi masih banyak kendalanya tapi tergantung pihak-pihak yang bekerja sama dalam mencari jalan keluar dari permasalahan pupuk yang terjadi namun kita selalu mengusahakannya agar petani dapat menebus pupuk dengan cepat dan padinya tumbuh bagus" (Hasil wawancara dengan HS tanggal 2 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas selaras dengan pihak BPP bahwa kerja sama yang terjadi sudah baik tetapi masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi setiap pihak yang berkolaborasi. Para pihak terus berusaha mencari cara untuk mencapai tujuan bersama dalam sektor pertanian khususnya komoditas padi di Kecamatan Kahu. Pada dasarnya para *stakeholder* lah yang memegang peranan penting dalam kolaborasi yang dilakukan.

Efektifnya suatu pekerjaan atau sebuah konsep yang telah dirancang. Termasuk dalam menjalin kerja sama dengan semua pihak harus memahami apa dampak jika diterapkan konsep Collaborative Governance. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Koordinator BPP tentang pandangannya tentang konsep kolaborasi yaitu

"Malahan bagus kalau ada konsep kolaborasi karena lebih mempermudah untuk kerja sama antara penyuluh, swasta dan petani dalam mengatasi masalah masalah yang terjadi dibidang pertanian khusus padi seperti yang telah saya paparkan sebelumnya tentang masalah-masalahnya. tapi kolaborasi memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak terlibat agar semua berjalan sesuai dengan yang diharapkan khususnya dibidang pertanian." (hasil wawancara dengan AM, tanggal 1 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa Konsep kolaborasi dapat mempermudah kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat terkait masalah dibidang pertanian. Namun kolaborasi juga membutuhkan

komitmen jangka panjang agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dari hasil wawancara dengan pihak swasta terkait konsep kolaborasi mengatakan

“Kalau saya sendiri melihat konsep kolaborasi sebagai suatu pendekatan yang sangat positif dan bagus. Masalah pupuk tidak dapat diselesaikan secara terpisah dan melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah saya yakin dapat mencapai solusi yang lebih terhadap masalah pupuk dan pertanian padi”(Hasil wawancara dengan HS tanggal 2 Februari 2024)

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa konsep kolaborasi merupakan suatu pendekatan yang positif. Dimana konsep kolaborasi dapat menjadi solusi antara para pihak yang terlibat dalam mengatasi permasalahan di bidang pertanian. Dengan adanya kolaborasi antara 3 pihak semakin baik dengan pupuk bisa ditangani, produksi bisa meningkat dan masyarakat petani puas karena produksi meningkat dan masyarakat sejahtera.

Adapun hasil wawancara dari indikator ini dapat disimpulkan bahwa terjalin kerja sama antara pihak BPP dengan PT Suryani terkait masalah pupuk yang terjadi di Kecamatan Kahu namun tetap pada kewenangannya masing-masing. Kerja sama itu terkait dengan data base penyaluran yang diberikan oleh BPP kepada pihak swasta untuk mengetahui kuota pupuk yang dibutuhkan petani dalam meningkatkan pertanian komoditas padi di Kecamatan Kahu. Dalam hal keefektifan juga dibutuhkan kerja sama antara semua pihak yang terlibat agar kolaborasi dapat terjalin lebih maksimal terutama dalam mengatasi masalah pupuk terkhusus komoditas padi.

3. Merencanakan Tindakan Kolaborasi Kolaborasi

Merencanakan tindakan kolaborasi antara BPP Kahu dengan PT Suryani merupakan sebuah upaya dalam pengembangan pertanian komoditas padi terkait

pupuk. Kolaborasi yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan yang berjalan dengan baik tidak akan lepas dari perencanaan yang baik pula. Dalam konsep kolaborasi pun demikian pasti dimulai dari perencanaan. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator BPP Kahu yaitu

“Kalau perencanaan itu terjadi sebelum terjadinya kolaborasi jadi harus memang direncanakan sejak awal dengan baik sehingga nanti kolaborasi berjalan lancar. Kita identifikasi dulu apa saja masalah yang terjadi di lapangan yah itu masalah pupuk terus kita tentukan apa tujuannya kita bekerja sama dan apa hasil yang mau kita capai karena sekarang pupuk di berikan sesuai RDKK dimana menggunakan sistem online melalui aplikasi sehingga kuota pupuk yang diberikan kepada petani mereka rasa kurang.. Terus yang kedua kita tentukan siapa saja yang bekerja sama ya itu pihak-pihak yang sesuai bidangnya supaya tidak ada tumpang tindih. Kemudian lagi kita rencanakanmi apa yang ingin dilakukan secara jelas supaya nanti terarah kerja sama ini. Namun saat ini perencanaannya itu belum maksimal. Karena perlu adanya perbaikan sistematis dalam penambahan kuota pupuk, perbaikan data petani untuk penebusan pupuk subsidi karena petani tidak bisa menebus pupuk subsidi ketika namanya tidak terdaftar di Rdkk karena sistem alokasi melalui aplikasi maka data petani harus diperhatikan sesuai dengan syarat syarat yang telah ditentukan . Jika data pribadi petani tidak benar maka namanya akan eror sehingga tidak mendapat pupuk subsidi” (hasil wawancara dengan AM, tanggal 1 Februari 2024)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa perencanaan dilakukan sebelum terjadinya kolaborasi. Dengan langkah awal mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan serta tujuan dari kolaborasi yang dilakukan. langkah awal yaitu menentukan pihak-pihak yang akan melakukan kolaborasi sesuai dengan bidangnya agar tidak terjadi tumpang tindih antara pihak yang terlibat di kemudian hari. kemudian memperjelas secara rinci rencana yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Namun saat ini belum maksimal karena sering terjadi kesalahan teknis. Adapun menurut pihak swasta yaitu

“Sebelum ada kerja sama dengan pihak lain pasti harus diketahui dulu apa masalah yang terjadi sampai terjadi kolaborasi. Sedangkan yang kita

tahu kalau pupuk itu sangatlah mempengaruhi hasil pertanian dan kualitas tanaman tapi juga memiliki dampak yang tidak bagus jika tidak dikelola dengan benar. Sama harga pupuk yang kadang mahal dan kuotanya yang kurang sehingga tidak merata dikalangan petani terlebih lagi sekarang pakai sistem online semua. Itulah dilakukan kerja sama supaya ditau berapa banyak kuota pupuk sama jenis pupuk apa yang dibutuhkan petani sedangkan datanya dari pemerintah” (Hasil wawancara dengan HS tanggal 2 Februari 2024)

Hasil wawancara diatas selaras dengan pihak BPP bahwa sebelum terjadi kolaborasi antara berbagai pihak hal pertama yang harus diketahui yaitu mengidentifikasi permasalahan apa yang terjadi. Dimana permasalahan yang menjadi permasalahan di bidang pertanian komoditas padi yaitu terkait pupuk yang kuotanya tidak mencukupi serta terkendala masalah teknis.

Hubungan kerja dalam menjalin kerjasama merupakan hal yang penting dalam meningkatkan pengembangan pertanian. Kerja sama antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dapat membawa dampak yang baik dalam mengatasi masalah pertanian padi. Adapun hasil wawancara dengan Koordinator BPP Kahu yaitu

“Dalam kolaborasi hubungan antara pihak lain harus harmonis apalagi terkait masalah pupuk dimana pemerintah sebagai pihak yang membuat regulasi atau aturan tentang pupuk, menyediakan infrastruktur dasar yang diperlukan kemudian pihak swasta yang menyediakan pupuk yang dibutuhkan sesuai data dari pemerintah. Dan pihak petani yang menjalankan atau melaksanakan kegiatan pertanian tetapi untuk sekarang belum maksimal” (hasil wawancara dengan AM, tanggal 1 Februari 2024)

Adapun wawancara yang dilakukan terkait hubungan yang terjalin tentang pupuk pihak Kepala desa Biru menyatakan

“Kerjasama kami dengan pihak lain terkait pupuk sangat penting dalam mendukung pertanian di wilayah kami. Bekerja sama dengan Dinas Pertanian yang dibawahnya terdapat BPP, perusahaan pupuk, dan juga kelompok petani untuk memastikan ketersediaan dan distribusi pupuk. (Hasil wawancara dengan R tanggal 6 Februari 2024)

Hasil wawancara diatas bahwa hubungan antara para pihak-pihak yang berkolaborasi harus harmonis dengan cara saling membantu dan saling memahami tugasnya masing-masing sesuai dengan kewenangan yang telah disepakati diawal.Kerja sama ini dibarengi denagn rasa empati,saling menghormati dan menerima kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak yang terlibat.Adapun hasil wawancara dari pihak swasta mengatakan

“Ya,semuanya ada tugas masing-masing dimana pemerintah yang memberi data tentang kuota pupuk yang dibutuhkan,kita sebagai swasta yang menyediakan pupuk yang dibutuhkan tetapi kadang kuota pupuk kurang bagi petani untuk pertaniannya ” (Hasil wawancara dengan HS tanggal 2 Februari 2024)

Hasil wawancara diatas bahwa Kerja sama yang terjadi sesuai dengan tugas yang telah diberikan masing-masing pihak.Dimana melibatkan pemerintah,swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pengembangan dibidang pertanian komoditas padi tetapi masih terdapat masalah-masalah yang terjadi seperti kuota pupuk yang tidak mencukupi bagi petani.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada ketua kelompok tani terkait hambatan petani dalam pertanian komoditas padi terkait pupuk yaitu:

“Kendalanya pupuk biasa lambat penyalurannya,kadang sudah mau digunakan tetapi belum datang sehingga padi sudah tua.Tetapi hanya sebagian namun tidak merata kadang dibagi 2 sampai 3 karung pupuk satu orang.Tetapi akhir-akhir ini sudah cepat penyalurannya tapi itulah tidak menentu. .(Hasil wawancara dengan AH tanggal 4 Februari 2024)

Hasil wawancara diatas bahwa hambatan yang dirasakan oleh petani yaitu sering terjadi keterlambatan penyaluran pupuk.Waktu penggunaan pupuk telah tiba tetapi pupuk belum juga tersalurkan ke petani.Serta pembagian pupuk yang tidak merata disebabkan alokasi yang tidak mencapai target sehingga menghambat

kegiatan pertanian. Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu petani terkait dengan hambatan yang dihadapi yaitu

“Kurang sekali pupuk yang dijual sedangkan banyak petani yang butuh sekali karna mau dipakai terus tidak cukup-cukup juga biasa dibagi sama yang lain dan biasa lambat juga datang jadi padi lambat juga diberi pupuk. (Hasil wawancara dengan H tanggal 4 Februari 2024)

Hasil wawancara diatas bahwa terbatasnya pupuk yang disediakan sehingga petani terkendala dalam melakukan kegiatan pertanian seperti pemupukan. Karena pupuk yang disediakan tidak mencukupi sehingga pembagian pupuk kepada petani tidak merata. Hal inilah yang harus diperhatikan agar kegiatan pertanian dapat berjalan secara optimal.

Dalam menghadapi hambatan yang terjadi perlu adanya cara untuk mengatasi hambatan tersebut agar dapat berjalan dengan lancar. Adapun hasil wawancara dengan ketua kelompok tani tentang program yang dilakukan pemerintah dengan swasta terkait masalah pupuk yaitu

“Ada, ini program dibahas ketika pertemuan diadakan baru baru ini. Sekarang mudah karena langsung ktp yang disetor pada pengecer. Kemarin pupuk sudah ada setelah sehari ktp dikembalikan. (Hasil wawancara dengan AH tanggal 4 Februari 2024)

Hasil wawancara diatas bahwa sekarang dalam penebusan pupuk menjadi mudah dikarenakan penebusan pupuk secara digital menggunakan aplikasi dengan syarat petani hanya menyettor KTP kepada pengecer kemudian beberapa hari diproses kemudian petani mengambil pupuk yang telah ditebus. Sistem ini membuat kegiatan penebusan pupuk semakin mudah karena data-data mengenai alokasi, jenis komoditi dan -lain telah tercatat pada sistem sehingga penyaluran pupuk tepat sasaran kepada penerimanya dan menghindari kesewenangan. Adapun

wawancara yang dilakukan dengan petani mengenai program terkait masalah pupuk yaitu

“Kita pakai ktp sekarang untuk menebus pupuk karena NIK yang mau dilihat sehingga dari situ sistem yang tentukan bilang berapa jumlah pupuk yang diberikan karena data nya diterbitkan oleh pemerintah dibantu kelompok tani” (Hasil wawancara dengan H tanggal 4 Februari 2024)

Hasil wawancara diatas mengatakan bahwa Sekarang dalam penebusan pupuk melalui mekanisme aplikasi dengan menggunakan KTP.Melalui aplikasi tersebut semua data terkait pupuk dapat dilihat seperti nama ,NIK,alokasi pupuk,jenis pupuk,tanggal penebusan serta tanda tangan.

Walaupun ada program yang dilakukan tetapi belum bisa mengatasi masalah pupuk. Pemerintah dan swasta sangat dibutuhkan terkait apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah ini.Hasil wawancara dengan ketua kelompok tani mengatakan

“Iya itulah pupuk diberikan sesuai dengan jatah kepada petani,jangan diberikan kepada pihak luar harus sesuai dengan kuota petan-petani disini.karena terkadang banyak petani yang mendapatkan pupuk ada juga yang tidak sehingga tidak merata.Karna kadang ada petani yang mengambil jatah petani lain .(Hasil wawancara dengan AH tanggal 4 Februari 2024)

Hasil wawancara diatas bahwa pemberian pupuk disesuaikan dengan data yang telah ditentukan oleh pemerintah.Jika terdapat pihak yang mengambil pupuk tidak sesuai dengan data maka terdapat petani lain yang tidak mendapatkan pupuk. Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan petani terkait langkah pemerintah terkait masalah pupuk yaitu

“Yah kuotanya ditambahlah karena sangat kurang kuotanya,kalau kita beli yang non subsidi lebih mahal lagi tidak bisa dijangkau masyarakat yang kurang dananya apalagi kalau banyak mau dipakai jadi semakin mahal nanti” .(Hasil wawancara dengan H tanggal 4 Februari 2024)

Hasil wawancara diatas mengatakan bahwa penambahan kuota merupakan salah satu cara yang harus dilakukan pemerintah dan swasta dalam mengatasi masalah terkait pupuk. Kurangnya kemampuan petani dalam menebus pupuk non subsidi karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh petani sehingga petani mengharapkan pupuk subsidi namun terkadang tidak mencukupi.

Pemerintah dan pihak swasta harus memikirkan cara alternatif dalam mengatasi pupuk ketika kuota pupuk subsidi kurang Hasil wawancara dengan ketua kelompok tani mengatakan

“Tidak karena kalau menggunakan pupuk dari kotoran sapi juga kurang ada jadi kita tunggu sampai pupuk tersedia. Kendala yang biasa terjadi bukan hanya dari pengecer tetapi juga dari dana tapi rata-rata kita ingin membeli tetapi tidak ada pupuk yang tersedia. Mungkin dari distributor juga karena pengecer juga tidak mendapat pupuk dari sana karena kurang sehingga pengecer pun di diminta menunggu juga”. (Hasil wawancara dengan AH tanggal 4 Februari 2024)

Hasil wawancara diatas bahwa petani tidak menggunakan kotoran hewan sebagai cara alternatif karena kurang dan cukup susah. Kendala lain yang dihadapi yaitu kurangnya dana untuk membeli pupuk serta pupuk yang kuotanya terbatas sehingga petani menunggu sampai pupuk tersedia kembali. Sedangkan wawancara dengan petani terkait cara alternatif ketika pupuk tidak mencukupi yaitu

“Sebenarnya cara alternatifnya itu pakai kompos dari kotoran sapi karena bagus juga tidak merusak tanah karena tidak ada bahan kimianya tetapi itu juga kurang biasanya dan lama juga prosesnya jadi kompos jadi ya kita tunggu saja itu pupuk subsidi sampai ada”. (Hasil wawancara dengan H tanggal 4 Februari 2024)

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa Salah satu cara yang menjadi alternatif bagi petani dalam mengatasi kurangnya pupuk yaitu penggunaan pupuk

kompos dari kotoran sapi tetapi petani lebih memilih untuk menu nggu pupuk sampai tersedia. Padahal pupuk kimia dapat merusak unsur tanah sehingga tingkat kesuburan menurun.

Adapun hasil wawancara pada indikator ini dapat disimpulkan bahwa kerja sama yang terjalin harus diawali dengan perencanaan yang matang. Permasalahan pertanian pada komoditas padi terkait pupuk merupakan sebuah masalah bagi berbagai pihak khususnya para petani. Dalam melakukan kolaborasi perlu adanya sinergi antara berbagai pihak baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat. Meskipun belum maksimal BPP Kahu dan swasta terus berupaya dalam mengatasi permasalahan pupuk yang terjadi di Kecamatan Kahu. Semua pihak bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Hal yang juga harus diperhatikan dalam melakukan kolaborasi yaitu harus ada evaluasi dalam bentuk pertemuan antar pemangku kepentingan untuk membahas lebih lanjut tentang kolaborasi yang terjalin. Kolaborasi ini diharapkan dapat memastikan petani mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau melalui program subsidi yang disediakan oleh pemerintah dan perusahaan pupuk. Selain itu juga mendapatkan bantuan teknis dari pemerintah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan teknik pertanian lainnya.

Secara keseluruhan, kolaborasi antara BPP Kahu, PT Suryani, kepala desa, dan petani telah membawa perubahan positif yang signifikan dalam pengelolaan pupuk di daerah kecamatan Kahu. Dengan terus memperkuat kerjasama dan mengembangkan inisiatif bersama, potensi untuk mencapai pencapaian lebih

lanjut dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan keberlanjutan pertanian di Kecamatan Kahu sangat mungkin terwujud.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Collaborative governance sangat penting sebagai sebuah usaha kerja sama antara pemangku kepentingan dalam mempertahankan pemerintahan dan mengelola urusan dalam penanganan masalah publik. Kerja sama yang dimaksud yaitu antara pemangku kepentingan yang melibatkan BPP Kahu, PT Suryani dan petani. Kerja sama ini dilakukan untuk mencapai tujuan bersama yang telah direncanakan sebelumnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam bagian ini terdapat penjelasan topik yang sesuai dengan temuan penelitian sehingga pada pembahasan ini peneliti akan mengabungkan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Hal ini sejalan dengan metode analisis kualitatif deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya penulis merumuskan *collaborative governance* dalam Meningkatkan Distribusi Pupuk Guna Pengembangan Sektor Pertanian di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone yang lebih berfokus pada bidang pertanian komoditas padi terkait pupuk subsidi menggunakan teori menurut Ratner (2012) yang terdiri dari 3 indikator yaitu; (1) Identifikasi hambatan, (2) strategi debat untuk mempengaruhi, (3) merencanakan tindakan kolaborasi. adapun pembahasan secara rinci hal tersebut sebagai berikut:

1. Identifikasi hambatan dan Peluang (*Identifying Obstacles dan Opportunities*)

Menurut Ratner (2012) pada tahap pertama ini merupakan tahap mendengarkan. Di sini, para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kerja sama mengidentifikasi berbagai tantangan yang mungkin timbul selama proses kolaborasi kemudian mereka mempertimbangkan cara untuk mengatasi setiap masalah yang diidentifikasi termasuk mencari solusi untuk masalah yang dapat muncul di masa depan.

Berdasarkan teori Ratner (2012) pada indikator ini sudah sesuai dengan hasil temuan dilapangan dimana semua aktor telah mengidentifikasi hambatan terkait kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi di Kecamatan Kahu dan pembahasan peluang adanya keterlibatan petani dan pihak swasta guna menangani kelangkaan pupuk yang terjadi. Pada konteks kolaborasi ini pihak BPP Kahu, PT Suryani dan petani menyampaikan kendala-kendala yang ditemukan sebelum melakukan kolaborasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa hambatan yang terjadi yaitu adanya kelangkaan pupuk yang terjadi sehingga pendistribusian pupuk lambat sementara petani sudah membutuhkan pupuk untuk pertanian mereka. Pada konteks kolaborasi ini terdapat pertemuan atau musyawarah yang sudah dilakukan dalam bentuk sosialisasi yang memberikan peluang untuk berkomunikasi dalam menjalankan koordinasi antara BPP Kahu, PT Suryani dan petani untuk mengatasi kelangkaan pupuk yang terjadi di Kecamatan Kahu. Dimana dalam pertemuan tersebut mengevaluasi permasalahan yang terjadi selama terjadi kerja sama di bidang pertanian.

2. Strategi Debat untuk Mempengaruhi (*Debating Strategies for Influence*)

Menurut Ratner (2012) pada tahap ini pihak yang terlibat melakukan dialog ataupun diskusi tentang hambatan yang telah disebutkan sebelumnya. Hal-hal yang dibicarakan oleh para pemangku kepentingan yaitu cara terbaik untuk memecahkan masalah. Serta melibatkan pihak-pihak yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang telah dijelaskan serta pembagian kewenangan masing-masing pihak yang berkolaborasi.

Berdasarkan teori Ratner (2012) pada indikator ini sudah sesuai dengan hasil temuan di lapangan dimana terdapat proses dialog yang terjadi hal itu tercermin dari pertemuan yang dilakukan oleh BPP Kahu, PT Suryani dan Petani tentang apa keuntungan yang dapat dirasakan dari kolaborasi yang terjalin. Semua aktor yang terlibat berperan aktif dalam diskusi yang dilakukan mencari solusi terbaik dalam mengatasi kelangkaan pupuk yang terjadi di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Semua aktor yang terlibat bermusyawarah untuk mengatasi kurangnya pupuk subsidi yang terjadi di Kecamatan Kahu adapun solusi yang dilakukan yaitu dengan adanya penambahan kuota pupuk bersubsidi bagi petani, melakukan evaluasi terkait kebutuhan teknis petani agar pupuk subsidi terbagi sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan serta memberi pemahaman kepada petani untuk menggunakan pupuk organik dan tidak bergantung pada pupuk kimia sehingga hasil produksi pertanian dapat meningkat.

Para Stakeholder yang terlibat dalam mengatasi kurangnya pupuk di Kecamatan Kahu telah memiliki tupoksi sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak yang terlibat guna menjalankan visi bersama. Hal tersebut

menunjukkan bahwa proses dialog yang dilakukan bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas masing-masing stakeholder karena setiap stakeholder memiliki kewenangan yang berbeda beda antara satu dengan yang lainnya

3. Merencanakan Tindakan Kolaborasi

Menurut Ratner (2012) tahap ini melibatkan perencanaan implementasi dari strategi-strategi yang telah dibahas sebelumnya. Para pemangku kepentingan mulai merencanakan langkah-langkah dalam proses kolaborasi antar *stakeholder*. Merencanakan tindakan kolaborasi adalah proses yang melibatkan perencanaan dan pengorganisasian upaya bersama antara pihak yang berkepentingan untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan teori Ratner (2012) pada indikator ini sudah sejalan dengan hasil temuan dilapangan dimana para aktor telah berkontribusi dalam kolaborasi untuk mengatasi kurangnya pupuk subsidi di Kecamatan Kahu. Dalam kolaborasi ini para stakeholder telah bekerja sama sesuai dengan tugas dan peran masing-masing yang telah disepakati sebelumnya yang melibatkan pihak BPP Kahu, Kepala Desa Biru, PT Suryani dan Petani. Dimana pihak BPP Kahu sebagai pihak yang memberikan penyuluhan kepada petani tentang pemilihan, penggunaan yang tepat, dan manfaat pupuk agar petani dapat meningkatkan hasil produksinya. Pihak swasta sebagai mitra dalam menyuplai alat-alat produksi pertanian seperti pupuk, racun, benih, traktor, pemanen padi serta petani sebagai kunci utama dalam kolaborasi ini karena petani yang menjalankan kegiatan pertanian dan sumber tenaga dalam bertani.

Dengan adanya kolaborasi antara 3 pihak yang terjalin maka masalah pupuk dapat ditangani karena pihak pemerintah tidak dapat mengatasi permasalahan tersebut secara sepihak saja maka dilibatkanlah pihak swasta dalam hal pengadaan pupuk karena terbatasnya anggaran pemerintah dan anggaran yang terkadang tidak tepat waktu sehingga pihak swasta ikut berkontribusi dalam hal pengadaan pupuk subsidi. Sehingga produksi pertanian khususnya padi dapat meningkat dan dapat mengsejahterakan masyarakat khususnya para petani.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai *Collaborative governance* dalam Meningkatkan Distribusi Pupuk Guna Pengembangan Sektor Pertanian di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam meningkatkan distribusi pupuk guna pengembangan sektor pertanian sudah terjadi proses kolaborasi antara pihak BPP Kahu, PT Suryani, Kepala desa Biru dan petani hal ini ditandai dengan adanya kerja sama antar stakeholder yang saling mendukung untuk mengatasi kelangkaan pupuk sehingga produksi bisa meningkat dan masyarakat petani puas. Namun masih terdapat hambatan-hambatan yang dirasakan dari *stakeholder* yang berkolaborasi dalam hal pengembangan sektor pertanian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran yang diberikan oleh peneliti. Adapun saran yang diberikan yaitu:

1. Meningkatkan komunikasi yang lebih intens antara para pihak agar dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak yang terlibat terutama petani dan Meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan pupuk subsidi untuk mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran.

2. Memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada petani tentang penggunaan pupuk secara efisien dan praktik pertanian yang berkelanjutan. Ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pupuk subsidi.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, N., & Arifin Fattah, M. (2022). Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Di Desa Campagaya Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. *Fruitset Sains*, 10(2), 60–69.
- Agus, Y. A., Tungga, Y., Karyasa, B., Pranandita, R., Suriyanti, P., Salama, H., Triani, N., Dudi, T., Gallyndra, S., Dinata, F., Fathan, J., & Rizki, H. (2022). *Pertanian Terpadu*.
- Amelia, P. (2023). *PERKEMBANGAN SEKTOR AGRARIA DI ERA MODERNISASI DALAM SEKTOR PERTANIAN DI SULAWESI SELATAN-PUTRI AMELIA HARIS*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/gr9hw>
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1–13. <http://repository.unair.ac.id/67685/>
- Astuti, W. dan R. (2020). Sampul Collaborative Governance. *Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Publik*, 161.
- Azis, A., Sugiarti, C., & Ramdani, R. (2022). Collaborative governance dalam upaya meningkatkan kinerja sektor pertanian. *Jurnal Manajemen*, 13(4), 647–653. <https://doi.org/10.30872/jmmn.v13i4.9948>
- Badrudin, D., Kurniansyah, D., & Rizki, M. F. (2022). Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Karawang: Sebuah Tinjauan Tentang Collaborative Governance. *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(13), 82–94.
- Baja, S., Wikantari, R., Perencanaan, J., Wilayah, P., Sarjana, P., Hasanuddin, U., Sistem, B., Sumberdaya, I., Pertanian, F., Hasanuddin, U., Perencanaan, B., Wilayah, P., Teknik, F., & Hasanuddin, U. (2017). *PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN DI KAWASAN MAMMINASATA PROVINSI SULAWESI SELATAN Food Crop Land Conversion Control in the Mamminasata Region South Sulawesi Province Hairuddin ISSN 2302-*

6340 PENDAHULUAN Alih fungsi lahan adalah perubahan fu. 6(2), 145–153.

- Basuki, A. T. (2008). Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Pasca Gempabumi Kabupaten Bantul. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Volume 9*(Nomor 1), Halaman 11-25.
- Cahyono, E., & Putra, A. B. (2022). Pendampingan Pembuatan Pupuk Kompos Bioslurry Skala Industri Menengah untuk Mengatasi Kelangkaan Pupuk. *Jumat Pertanian: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3*(2), 82–86. <https://doi.org/10.32764/abdimasper.v3i2.2879>
- Chotimah, H. C., Iswardhana, M. R., & Rizky, L. (2022). Model Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Maritim di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional, 27*(3), 348. <https://doi.org/10.22146/jkn.69661>
- Fatimah, P., Mahsyar, A., & Kasmad, R. (2021). Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kabupaten Wajo. *Jurnall Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 2*(1), 294–307.
- Iyoega, R. R., Trilestari, E. W., & Kirana, C. A. D. (2020). Collaborative Governance dalam Pembangunan Sektor Pertanian di Kabupaten Bandung. *Perspektif, 9*(1), 55–65. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.2864>
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 6*(1), 68–84. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119>
- Kiswoyo, G. P., Nurcahyanto, H., & ... (2023). Proses Collaborative Governance Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota *Policy and Management ...*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/37955%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/37955/28670>
- Krisna, B., Mamilianti, W., & Nuzuliyah, L. (2022). *Pengaruh Pupuk Subsidi Terhadap Pendapatan Petani Padi di Kecamatan sukorejo Kabupaten pasuruan. 3*(2), 73–78.
- Kudrati, D. L., & Kusmiati, A. (2010). Faktor-faktor yang berperan dalam

- kelangkaan pupuk bersubsidi. *J-Sep*, 4(1), 63–80.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEP/article/view/370/228>
- Muhammad, Z. (2015). Analisis Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Sub Sektor Bahan Pangan Di Kabupaten Boyolali. *Economics Development Analysis Journal*, 4(4), 385–396.
- No Title. (2023).
- Paramithasari, I., Widayanti, S., Yuliati, N., & Wijayati, P. D. (2021). KINERJA SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI JAWA TIMUR PADA MASA PANDEMI COVID-19. In *ZIRAA'AH MAJALAH ILMIAH PERTANIAN* (Vol. 46, Issue 3, p. 428). Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin.
<https://doi.org/10.31602/zmip.v46i3.5372>
- Ratner, B. D., Barman, B., Cohen, P., Kosal, M., Nagoli, J., & Allison, E. H. (2012). *Strengthening Governance Across Scales in Aquatic Agricultural Systems*.
- Rithania Michélie Tompunu, J. L. dan W. W. (2021). Strategi Dinas Pertanian Dalam Menanggulangi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Modinding. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–9.
- Saputra, P. R., Lendra, W., Destrilia, I., & Wahyuni, F. (2022). Pengembangan Wisata dan Ekonomi Kreatif Lampung dalam Perspektif Collaborative Governance. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 13(1), 33–48.
<https://doi.org/10.23960/administratio.v13i1.278>
- Siregar, M. A. R. (2023). *PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN MELALUI PENERAPAN SISTEM PERTANIAN TERPADU*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/c6hjz>
- Sriwinarti, N. K. (2017). *PENDISTRIBUSIAN PUPUK DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN*. 351–356.
- Toyib, H., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). *KOLABORASI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENCAPAIAN TARGET DAN SASARAN KINERJA LKPJ PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NIAS COLLABORATIVE OF HUMAN*

RESOURCES IN ACHIEVING LKPJ TARGETS AND PERFORMANCE GOALS AT DINAS KETAHANAN PANGAN. 10(4), 1508–1516.

Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.*

<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>







**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email : fisip@unismuh.ac.id
Official Web : <https://fisip.unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

Nomor : 2397/FSP/A,5-VI/IX/1445/2023

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Nurul Azizah
Stambuk : 105641108720
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :

**"Multilevel Governance Dalam Penerapan Ekonomi Hijau Sektor Agraria
di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone"**

Pembimbing I : Drs. H. Ansari Mone, M.Si
Pembimbing II : Nurbliah Tahir, S.Sos., M.AP

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar,
Pada tanggal : 11 September 2023

D e k a n,

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727

Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 1045/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Bone
Perihal	: <u>izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3373/05/C.4-VIII/I/1445/2024 tanggal 17 Januari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: NURUL AZIZAH
Nomor Pokok	: 105641108720
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul:

**" COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN PENGEMBANGAN SEKTOR
PERTANIAN DI KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 23 Januari s/d 23 Maret 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 19 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Petta Ponggawae No. 4, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 25056, Faximile (0481) 25056,
Laman <https://dpmpstsp.bone.go.id/>, pos-el dpmpstspbone@gmail.com

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.114/II/DPMPSTSP/2024

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : NURUL AZIZAH
NIP/Nim/Nomor Pokok : 105641108720
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Biru Kec. Kahu
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :
"COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN PENGEMBANGAN SEKTOR
PERTANIAN DI KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE"

Lamanya Penelitian : 24 Januari 2024 s/d 23 Maret 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Camat Kahu Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 24 Januari 2024
KEPALA DINAS,



Drs. ANDI AMRAN, M. Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681122 198908 1 001

Rp.0,-

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone di Watampone.
2. Arsip.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Nurul Azizah
Nim : 105641108720
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 April 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursitah Al Amin, M.I.P.
NIDN: 964691

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



Wawancara dengan Ibu A.Murtiningsih S.P,M.P selaku koordinator BPP Kahu



Wawancara dengan bapak H.Sule Selaku pemilik PT Suryani



Wawancara dengan Bapak Abdul Haris selaku Ketua Kelompok Tani



Wawancara dengan Bapak Hasbi salah satu petani



Halaman BPP Kahu



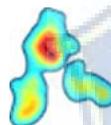
Stok Pupuk di PT Suryani



Stok Pupuk di Pengecer Pupuk



Publish or Perish

 **VOSviewer Online**
Visualizing scientific landscapes

Aplikasi Olah Data





Daftar Nama-Nama Kelompok Tani Di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

NAMA KELOMPOK TANI KECAMATAN KAHU		
A. Desa Biru	B. Desa Sanrego	C. Desa Tompong Patu
1. Sipakainge	1. Padaelo 1	1. Lebbae
2. Cilellang 1	2. Padaidi	2. Reso Pammase
3. Lappoase	3. Mappasitujue	3. Mappesonae
4. Hoddie	4. Padaelo 2	4. Cadda
5. Cilellang 2	5. Saromase	5. Lebba To Bone
6. Temmalilu	6. Detereng	6. Mattajeng
7. Samaenre	7. Tunreng Tellue 2	7. Huttange
8. Mammula	8. Temmappasilaingeng	8. Bancee
Menre	9. Kencana	9. Tappeso
9. Pakkalebba	10. Mulamenre	10. Lappa Tonra
10. Sipakainge 2	11. Bulu Lasenri	11. Batu Pute
11. Tunas harapan	12. Malilu Sipakainge 1	12. Mekar
12. Mattaro Deceng	13. Malilu Sipakainge 2	13. Harapan Makmur
13. Bongki	14. Padukka	14. Mulacollie
14. Bulu Lasolong	15. Mattirobulu	15. Gattungeng
15. Mulamenre	16. Mattirowalie	16. Tenrisannae
16. Batumpekke	17. Mulya jaya	17. Manginrara
17. Mammula	18. Harapan Jaya	18. Mamminasae
Menre 1	19. Majalengka	19. Ajuarae

18. Ulu galung	20. Sipurenrengie 1	20. Masagenae
19. Abadi	21. Sipurenrengie 2	21. Malisiparappe
20. Temmalilu	22. Mattirodeceng	22. Mannennungeng
Syeddang	23. Pammase	23. Palenreng
21. Semoga Jaya	24. Maddarengpulu	24. Mattirodeceng
22. Pakkaledeng	25. Mabentengpulu	25. Tekkue
23. Mulampekke	26. Sidenreng Pulu	26. Mattirotajang
24. Mattirowalie	27. Paroto	27. Bolong Sanrego
25. Satungke	28. Ajuarae	28. Mattuju
26. Padaidi	29. Jurunge	29. Tampo Darae
27. Sipatokkong	30. Tunreng Tellue 1	30. Mattiro Bulu
28. Leku Caloe		
29. Ukkurue		
30. Buhung kanneng		
31. Mappapole		
Sumange		
32. Batu-batu		
33. Mekar		
34. Tappile		
35. Tea Malala		

D. Desa Pasaka	E. Desa Bontopadang	F. Desa Palakka
1. Maccolliloloe	1. Tunas Muda	1. Sipakaenre
2. Salo Lanrang	2. Padang Mabbekko	2. Camilo
3. Paolahengengae	3. Sipatuo	3. Sipakatuo
4. Mulamompoe	4. Ellue	4. Lebba huse
5. Tonrongtengngae	5. Mappapoleonro	5. Melati
6. Mattiro Deceng	6. Liu Lampe	6. Cabberu
7. Sipakainge	7. Maddempungeng	7. Mattirowalie
8. Siamasei	8. Buhung patu	8. Sanggar Tani
9. Sipakarajae	9. Pelita jaya	9. Harapan baru
10. Samaenre	10. Mattiro Bulu	10. Temmalilu
11. Mattirowalie	11. Kabaloang	11. Sumber bahagia
12. Mamminasae	12. Padang Lampe	12. Sipatuo
13. Tenrisangkae	13. Huttange	13. Siamasei
14. Pakkawae	14. Bulu-Bulu	14. Anggrek
15. Tohongnge	15. Jiwa Sabar	15. Tippulu
16. Andi Camandini	16. Padaelo	16. Rebba Sipatokkong
17. Cinripole	17. Mattirowalie	17. Hasanae
18. Tenrisangkae 2	18. Palungeng patue	18. Lestari
19. Maccollieloloe 2	19. Ulu galung	19. Teppoe
20. Cinripole 2		20. Mattampa walie
		21. Pessu-Pessu
		22. Mandiri

		23. Begadang 24. Lelewali 25. Barugae 26. Kacilo
G. Desa Nusa	H. Desa Carima	I. Desa Arallae
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bulu pattuku 2. Jerrae 3. Bulu Punranga 4. Appasareng 5. Bulu Cempa 6. Mattompare 7. Kampong Baru 8. Bulu Pacelleng 9. Coppo Ibang 10. Pakkawae 11. Tabbangka 12. Bulu Lampeng 13. Diaja appasareng 14. Mattiro Walie 15. Anggeddange 16. Appangngisoreng 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinar Sanrego 2. Borong Panning 3. Siamasei 4. Mapparewe 5. Masagenae 6. Sipakainge 7. Padaidi 8. Padaelo 9. Mattorodeceng 10. Waetuo 11. Carumbae 12. Bulu Cekku 13. Ujung Tanah 14. Mali Siparappe 15. Massaile 16. Duppamata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buhung Patu 2. Agro Makmur 1 3. Cefe 4. Samaenre 1 5. Agro Makmur 2 6. Batu Pute 1 7. Batu Pute 2 8. Pao Pakkae 9. Samaenre 2 10. Mappideceng 11. Buhung pale 12. Leppangeng

J. Desa Cakkela	K. Desa Hulo	L. Desa Maggenrang
1. Makkawarue 2. Seppange 3. Poleonro 4. Sangyangseri 5. Sappewalie 6. Cappa Ale 7. Sanrangeng 8. Baru Maju 9. Sipakainge 10. Tunas Harapan 11. Puncak Jaya 12. Laoe	1. Cempaka Putih 2. Batutaneng 3. Siamasei 4. Kampung Tengah 5. Lacipi 6. Salobarang 7. Bolatellue 8. Sipadecengi 9. Kadieng Lappoase 10. Bulu Mattuppu 11. Senggebgpalie 12. Lapaddo 13. Sipakainge 14. Bentenge 15. Massaile 16. Swadaya 17. Makkamase 18. Lempongloang	1. Hoddie 2. Ada nagau 3. Mattirodeceng 4. Buae 5. Buhung paru 6. Pao Kalikie 7. Mattaropuli 8. Mamminasae 9. Garopo 10. Batu Kajoang 11. Salo Ecceng 12. Dumbia 13. Maglang
M. Desa Balle	N. Desa Mattoanging	O. Desa Matajang
1. Tippulue 2. Sipatokkong 3. Mappideceng	1. Bulu Cirong 2. Kello 3. Bulu Mattumpu	1. Mappapole Adae 2. Suka Maju 3. Mappapoleonro

<ol style="list-style-type: none"> 4. Sipakainge 5. Sentosa 6. Padaelo 7. Mandiri 8. Masyauro 9. Akmur 10. Mabbarakkae 11. Buhung kalosi 12. Padaidi 13. Mattirowalie 14. Maccirinnae 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mali Siparappe 5. Attoanging 6. Samaenre 7. Lappa Pakkita 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mattirowalie 5. Mattaropuli 6. Siamasei 7. Tadang palie 8. Mappadaelo 9. Maccirinnae 10. Sompung Loloe
P. Desa Cenrana	Q. Desa Labuaja	R. Desa Lalepo
<ol style="list-style-type: none"> 1. Salewangeng 2. Mattaroadada 3. Lebba Panruku 4. Pakkasalo 5. Bulu Pacelleng 6. Jramele 7. Sipakenre 8. Padaelo 9. Samarennu 10. Sinar Samarennu 11. Cendana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reso pammase 2. Kampung Beru 3. Calapari 4. Ale Tenggara 5. Buhung Kenrang 6. Laungeng 7. Sienrekeng 1 8. Sienrekeng 2 9. Ajuarae 10. Sabbarae 11. Samaenre 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mannennungeng 2. Mattirowalie 3. Sipakainge 4. Makkawarue 5. Mabbulocipeppa 6. Maccirinna

12. Mekar 13. Polewali 14. Mattirowalie 15. Lappo batu 16. Jahi-jahi 17. Bonto Parehe 18. Massamaturue	12. Lapinceng 13. Bola Mabborong	
S. Desa Cammilo	T. Kelurahan Palattae	
1. Batu Putih 2. Ajuarae 3. Pasanre 4. Lestari 5. Bulu Kamase 6. Mekar 7. Melati 8. Reso Pamase 9. Bulu Massumpang 10. Mattirowalie	1. Bersatu 2. Siamasei 3. Samaenre 4. Sipakainge 5. Dua Boccoe	

RIWAYAT HIDUP



Nurul Azizah, Lahir di Sinjai 19 Mei 2001, anak pertama dari pasangan Hasbi dan Nurjannah. Penulis pertama kali menempuh pendidikan sekolah dasar pada tahun 2007 di SD 279 Carima dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP 4 Kahu dan selesai pada tahun 2017. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 6 Bone dan tamat pada tahun 2020, dan pada tahun yang sama penulis mendapat kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan dapat menyusun skripsi ini dengan judul *collaborative Governance dalam Meningkatkan Distribusi Pupuk Guna Pengembangan Sektor Pertanian Di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*.